



**ANALISIS DISPARITAS REGIONAL ANTAR PROVINSI DI
INDONESIA 2011 – 2015 (MODEL REGRESI SPASIAL)**

SKRIPSI

Oleh

**Debby Marantika
NIM 130810101135**

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
JURUSAN ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2017**



**ANALISIS DISPARITAS REGIONAL ANTAR PROVINSI DI
INDONESIA 2011 – 2015 (MODEL REGRESI SPASIAL)**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ekonomi Pembangunan (S1) dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi

Oleh

**Debby Marantika
NIM 130810101135**

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
JURUSAN ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2017**

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur kepada Allah Yang Maha Esa serta atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya yang tercurah untuk penulis, berbagai kerja keras, pengorbanan, dan perjuangan, kesabaran, senantiasa menyertai proses penyelesaian skripsi ini, dan penulis persembahkan kepada:

1. Ibunda Harisun Wike Purwanti dan Bapak Sudiyono tercinta yang telah memberi doa, semangat, kasih sayang tiada henti, dan pengorbanan yang sangat besar untuk menggapai mimpi gemilang dengan ikhlas dan penuh kesabaran.
2. Nenek Khatijah dan Kakek Alm. Suham yang senantiasa membimbing, menasehati, mendoakan dan dukungan tiada henti.
3. Guru – guru sejak Taman Kanak – Kanak hingga perguruan tinggi terhormat yang telah mentransfer ilmu pengetahuannya untuk penulis, membimbing, mengarahakan dengan penuh kesabaran.
4. Almamater tercinta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

MOTTO

*“ Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmat kepada Luqman, yaitu:
“Bersyukurlah kepada Allah. Dan barangsiapa yang bersyukur (kepada Allah),
maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri; dan barangsiapa yang
tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”*

(Terjemahan Q.S Luqman Ayat 12)

“ Semua hal pasti sulit sebelum hal – hal tersebut menjadi mudah”

(Thomas Fuller: 1608 – 1661, Penulis Inggris)

*“Seberapa besar kesuksesan Anda bisa diukur dari seberapa kuat keinginan
Anda, setinggi apa mimpi-mimpi Anda, dan bagaimana Anda memperlakukan
kekecewaan dalam hidup Anda”*

(Robert Kiyosaki, Motivator Amerika Serikat)

PERNYATAAN

Penulis yang bertanda tanga dibawah ini:

Nama : Debby Marantika

NIM : 130810101135

menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Disparitas Regional Antar Provinsi Di Indonesia 2011 – 2015 (Model Regresi Spasial)” adalah asli hasil karya sendiri, kecuali dalam pengutipan yang telah disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan di institut manapun dan bukanlah hasil karya plagiarisme. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isi dari skripsi ini berdasarkan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika memang terbukti tidak benar.

Jember, 18 Juli 2017

Debby Marantika
130810101135

SKRIPSI

**ANALISIS DISPARITAS REGIONAL ANTAR PROVINSI DI INDONESIA
2011 – 2015 (MODEL REGRESI SPASIAL)**

Oleh

Debby Marantika

NIM 130810101135

Pembimbing

Dosen pembimbing I: Dr. Teguh Hadi Priyono, SE., M.Si

Dosen pembimbing II: Dr. Sebastiana Viphindartin, M.Kes

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Disparitas Regional Antar Provinsi Di Indonesia
2011 – 2015 (Model Regresi Spasial)
Nama Mahasiswa : Debby Marantika
NIM : 130810101135
Jurusan : Ilmu Ekonomi Pembangunan
Konsentrasi : Ekonomi Regional
Tanggal Persetujuan : 18 Juli 2017

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Teguh Hadi Priyono, S.E., M.Si
NIP. 19700206 199403 1 002

Dr. Sebastiana Viphindartin, M.Kes
NIP. 19641108 198902 2 001

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Dr. Sebastiana Viphindartin, M.Kes
NIP.19641108 198902 2 001

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI

**ANALISIS DISPARITAS REGIONAL ANTAR PROVINSI DI INDONESIA
2011 – 2015 (MODEL REGRESI SPASIAL)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Debby Marantika
NIM : 130810101135
Jurusan : Ilmu Ekonomi Pembangunan

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

8 September 2017

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

1. Ketua : Drs. Badjuri, M.E. (.....)
NIP. 19531225 198403 1 002
2. Sekretaris : Dr. Siswoyo Hari Santosa, S.E., M.Si. (.....)
NIP. 19680715 199303 1 001
3. Anggota : Dra. Nanik Istiyani, M.Si. (.....)
NIP. 19610122 198702 2 002



Mengetahui/ Menyetujui,
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Dekan,

Dr. Muhammad Miqdad, S.E, M.M., Ak,CA
NIP. 19710727 199512 1 001

Analisis Disparitas Regional Antar Provinsi Di Indonesia 2011 – 2015 (Model
Regresi Spasial)

Debby Marantika

*Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Jember*

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara kepulauan, dengan populasi jumlah penduduk yang melebihi 250 juta jiwa. Kaitannya, masalah makroekonomi yang dihadapi tidak terlepas dari gejala sosial salah satunya tingkat kesenjangan antar wilayah. Kesenjangan antar wilayah merupakan suatu keadaan ketidakseimbangan perekonomian yang terjadi dalam satu negara. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan kesenjangan antar wilayah diantaranya potensi sumber daya yang dimiliki, infrastruktur, kondisi sosial masyarakat, tingkat pendapatan, dll. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak disparitas wilayah dengan mengikutsertakan unsur spasial, serta variabel-variabel yang mempengaruhi tingkat disparitas antar Provinsi diantaranya yaitu Indeks Gini sebagai variabel dependen, PAD, PDRB per Kapita, DAU, PMDN dan PMA sebagai variabel independen. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel yang kemudian dirata-rata dengan menggunakan metode analisis spasial, dimana model terpilih adalah model *spatial lag* dengan menggunakan bantuan *software* Geoda. Hasil analisis menunjukkan bahwa di masing-masing wilayah studi terindikasi adanya aspek spasial, bahwa aspek spasial berpengaruh terhadap tingkat disparitas Wilayah di Indonesia dengan arah negatif. Yaitu jika terjadi kenaikan nilai indeks gini di wilayah studi, maka secara spasial, akan menurunkan nilai indeks gini di wilayah tetangga. Variabel independen di Wilayah I PDRB Per Kapita, DAU berpengaruh secara signifikan, sementara variabel lainnya tidak berpengaruh secara signifikan, Wilayah II menunjukkan bahwa seluruh variabel berpengaruh secara signifikan, sementara Wilayah III PAD dan PMDN berpengaruh secara signifikan, variabel lainnya tidak berpengaruh secara signifikan.

Kata Kunci : Disparitas, Indeks Gini, Spasial, *Spatial Lag*.

*Analysis Of Regional Disparities Among The Provinces In Indonesia 2010-2015
(Spatial Regression Models)*

Debby Marantika

*Departement of Economics and Development Studies, Faculty of Economics and
Business, University of Jember*

ABSTRACT

Indonesia is an archipelagic country, with a population of over 250 million inhabitants. Relation, macroeconomic problems faced can not be separated from social phenomenon one of them the level of gap between regions. The gap between regions is a state of imbalanced economic inequality within a country. There are several factors that can cause disparities between regions such as the potential of resources owned, infrastructure, social conditions, income levels, etc. The purpose of this study is to analyze the impact of regional disparity by including spatial elements, and the variables that influence the level of disparity among provinces such as Gini Index as the dependent variable, PAD, GRDP per Capita, DAU, PMDN and PMA as independent variables. The data used in this research is panel data which then averaged by using spatial analysis method, where the selected model is spatial lag model by using Geoda software aid. The results of the analysis indicate that in each study area indicated spatial aspect, that the spatial aspect influences the level of regional disparity in Indonesia with negative direction. That is, if there is an increase of gini index value in the study area, then spatially, it will decrease the value of gini index in neighboring region. The independent variable in Region I PDRB Per Capita, DAU has significant influence, while other variables have no significant effect, Region II shows that all the variables significantly influence, while Region III PAD and PMDN have significant effect, other variables have no significant effect.

Keywords: *Disparity, Gini Index, Spatial, Spatial Lag.*

RINGKASAN

Analisis Disparitas Regional Antar Provinsi Di Indonesia 2011 – 2015 (Model Regresi Spasial); Debby Marantika, 130810101135; 2017: 87 Halaman; Program Studi Ekonomi Pembangunan, Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Pembangunan ekonomi merupakan proses dalam sebuah perekonomian negara ke arah yang lebih baik yang bersifat *sustainable*. Pembangunan ekonomi diharapkan mampu mempengaruhi struktur perekonomian yang nantinya dapat memicu aspek pertumbuhan ekonomi di berbagai bidang. Ada beberapa kriteria yang perlu dilakukan untuk menuju pembangunan yang diinginkan, misalnya dalam segi penyediaan modal, kualitas sumber daya manusia, sumber daya alam, kestabilan politik, jumlah penduduk, dan lainnya. Profesor Bert Hoselitz, “pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses yang tidak hanya mempengaruhi hubungan ekonomi tetapi keseluruhan tatanan sosial dan budaya masyarakat (Jhingan, 2003:46). Secara umum pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditandai dengan seberapa besar pendapatan nasional yang diperoleh oleh negara tersebut. Namun tidak semua negara dapat dikatakan berhasil dalam segi pembangunan dilihat dari sisi pendapatan. Pembangunan dikatakan berhasil jika masalah makroekonomi dapat diatasi dengan baik. Indonesia merupakan negara kepulauan agraris yang terdiri dari beberapa pulau dengan total provinsi sebanyak 34 provinsi. Dari masing-masing provinsi yang ada, mempunyai potensi dan keanekaragaman yang berbeda. Namun walaupun begitu ketidakmerataan pembangunan masih belum stabil. Seperti halnya pembangunan dan pusat-pusat industri lebih berkembang di Indonesia bagian barat lebih tepatnya di Pulau Jawa dan sekitarnya. Dalam laporan (*Organization for Economic Cooperation and Development, 2015*) disingkat OECD menjelaskan bahwa Indonesia kemiskinan sebagian besar, namun tidak semata-mata, ditemukan di wilayah pedesaan dan pertanian yang merupakan tempat tinggal dari sekitar separuh jumlah penduduknya. Pada tahun 2012, 14,3 persen penduduk desa berada di bawah garis

kemiskinan pedesaan bila dibandingkan dengan penduduk kota yang hanya sebesar 8,4 persen, Bank Dunia (2012) memperkirakan bahwa 40 persen rakyat Indonesia memiliki kerentanan yang tinggi terhadap kemiskinan. Dalam penelitian ini, Indonesia akan dibagi menjadi tiga wilayah studi yaitu Wilayah I terdiri dari koridor Sumatera dan Kalimantan. Wilayah II terdiri dari Koridor Jawa dan Bali-Nusa Tenggara. Sedangkan Wilayah III terdiri dari Koridor Sulawesi dan Papua. Dari latar belakang masalah di atas, penelitian ini membahas mengenai bagaimana tingkat kesenjangan yang terjadi jika dilihat dari segi spasial, serta pengaruh variabel ekonomi seperti PAD, DAU, PDRB per kapita, PMA, dan PMDN terhadap tingkat kesenjangan yang terjadi antar Provinsi di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis dampak disparitas secara spasial yang terjadi antar provinsi di Indonesia serta menganalisis pengaruh variabel PAD, DAU, PDRB per kapita, PMA, dan PMDN terhadap tingkat disparitas wilayah yang terjadi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis spasial ekonometri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi interaksi spasial di masing-masing wilayah studi. Untuk Wilayah I aspek spasial berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap variabel indeks gini dengan koefisien regresi sebesar $-0,1789607$ dengan nilai probabilitas sebesar $0,00000$ yang berarti signifikan terhadap tingkat $\alpha = 0,05$ dan $\alpha = 0,1$. Variabel PAD tidak berpengaruh secara signifikan terhadap indeks gini dengan nilai koefisien negatif sebesar $-8,622154e-015$ dan nilai probabilitas sebesar $0,11389$ yang lebih besar dari $\alpha = 0,05$ ataupun $\alpha = 0,1$. Variabel PDRB per Kapita berpengaruh secara signifikan terhadap indeks gini, dengan arah koefisien negatif sebesar $-7,86217e-010$ dengan probabilitas sebesar $0,04356$ dimana nilainya lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ ataupun $\alpha = 0,1$. Variabel DAU berpengaruh secara signifikan dengan arah koefisien negatif dengan nilai probabilitas sebesar $0,10057$ signifikan pada tingkat $\alpha = 0,05$ dan $\alpha = 0,1$. Variabel PMA dan PMDN tidak berpengaruh signifikan dalam model dimana nilai probabilitas untuk PMA sebesar $0,11146$ dan PMDN sebesar $0,58722$. Untuk Wilayah II aspek spasial berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap variabel indeks gini dengan koefisien regresi sebesar $-0,1526073$ dengan nilai

probabilitas sebesar 0,00000 signifikan terhadap tingkat $\alpha = 0,05$ dan $\alpha = 0,1$. Variabel PAD berpengaruh secara signifikan pada tingkat $\alpha = 0,05$ dan $\alpha = 0,1$ dengan arah negatif dengan nilai probabilitas sebesar 0,00000. Variabel PDRB per kapita berpengaruh signifikan terhadap terhadap indeks gini dengan arah koefisien positif dan nilai probabilitas sebesar 0,00000, lebih kecil dari tingkat $\alpha = 0,05$ dan $\alpha = 0,1$. Variabel DAU berpengaruh secara signifikan terhadap indeks gini dengan arah positif dengan nilai probabilitas sebesar 0,00000, lebih kecil dari tingkat $\alpha = 0,05$ dan $\alpha = 0,1$. Variabel PMDN berpengaruh signifikan terhadap tingkat indeks gini dengan arah koefisien negatif dengan nilai probabilitas sebesar 0,00495 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ dan $\alpha = 0,1$. Variabel PMA berpengaruh secara signifikan terhadap indeks gini dengan arah positif dan nilai probabilitas sebesar 0,00000 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ dan $\alpha = 0,1$. Wilayah III aspek spasial berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap variabel indeks gini dengan koefisien regresi sebesar -0,151309 dengan nilai probabilitas sebesar 0,00639 yang berarti signifikan terhadap tingkat $\alpha = 0,5$ dan $\alpha = 0,1$. Variabel PAD berpengaruh secara signifikan dengan nilai probabilitas 0,02934 yang berarti lebih kecil pada tingkat $\alpha = 0,05$ persen ataupun $\alpha = 0,1$ dengan arah koefisien positif. variabel PMDN berpengaruh secara signifikan dengan arah negatif dimana nilai probabiliti sebesar 0,04808 yang signifikan pada tingkat $\alpha = 0,05$ ataupun $\alpha = 0,05$. Sedangkan Variabel PDRB per Kapita, DAU, dan PMA tidak berpengaruh secara signifikan terhadap indeks gini.

PRAKATA

Puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Disparitas Regional Antar Provinsi Di Indonesia 2011 – 2015 (Model Regresi Spasial)” dengan lancar, walaupun ada beberapa kendala namun dapat teratasi dengan baik. Penyusunan skripsi ini salah satunya adalah untuk memenuhi persyaratan tugas akhir dalam meraih gelar sarjana khususnya Strata satu (S1) Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, tidak lepas dari dukungan, semangat, dan kerja keras dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Teguh Hadi Priyono, S.E., M.Si selaku dosen pembimbing I yang mana senantiasa membimbing, meluangkan waktunya, tenaga serta pikiran, dan mengarahkan dengan penuh kesabaran dan ikhlas, serta motivasi hidup dimana “selalu menikmati setiap proses karena nantinya akan menjadi kenangan dimasa mendatang”.
2. Ibu Dr. Sebastiana Viphindartin, M.Kes selaku dosen pembimbing II yang telah senantiasa membimbing dan mengarahkan dengan sabar dan tulus dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Dr. Sebastiana Viphindartin, M.Kes selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan.
4. Bapak Dr. Muhammad Miqdad, S.E, M.M., Ak, CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
5. Drs. Achmad Qosjim, M.P selaku dosen pembimbing akademik yang senantiasa membimbing penulis selama masa studi.
6. Ibu Dr. Lilis Yuliati, S.E., M.Si selaku dosen pembimbing akademik pengganti dari Bapak Drs. Achmad Qosjim, M.P, dimana beliau selalu mengarahkan penulis selama masa studi
7. Bapak Dr. Rafael Purtomo S, S.E., M.Si yang turut serta memberi dorongan dan motivasi dengan penuh kesabaran.

8. Bapak Dian Indayana selaku teknisi Fakultas Teknologi Pertanian yang turut membantu, mengarahkan, dan memberikan ilmunya kepada penulis.
9. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember khususnya jurusan Ekonomi Pembangunan yang mana senantiasa memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis hingga sampai pada tahap akhir perkuliahan ini yaitu penyusunan skripsi.
10. Kedua orang tua tercinta Ibunda Harisun Wike Purwanti dan Bapak Sudyono yang selalu memberi dukungan moral maupun materi, nasehat serta segala kasih sayang yang beliau curahkan kepada penulis.
11. Adik tersayang Rendy Dwi Mahendra yang selalu menjadi penyemangat dan kasih sayang yang tulus kepada penulis.
12. Seluruh keluarga terkasih Nenek Khatijah dan Alm. Kakek Suham, Pak De, Bu De, termasuk Riski Ade Pradana, yang turut mendoakan dan memberi dukungan, motivasi, perhatian, serta kasih sayangnya selama ini.
13. Mbak Elly selaku kakak tingkat angkatan 2012 terimakasih atas bantuannya selama ini yang telah meng – *share* ilmunya kepada penulis dan teman – teman seperjuangan skripsi dengan penuh kesabaran.
14. Kumpulan sahabat tersayang Adel, Sucik, Mba Fita, Rizki Ajusi, Mila, Mba ine, Mak Firoh, Indah, Ocy, Jainul, Ima, Illoh. Terima kasih buat kalian semua yang telah memberi keceriaan, kekonyolan, kebahagiaan , suka duka, yang akan menjadi kisah klasik dikemudian hari
15. Keluarga besar UKM Kelompok Studi Penelitian Ekonomi (KSPE) khususnya kepengurusan 2015/2016 Abi, Mas didit, Reny, Widy (Yanto), Idris, Dila, Ida, Veny, yang telah memberi goresan kebahagiaan terima kasih buat kalian semuanya.
16. Teman – Teman se-Angkatan 2013 IESP khususnya Konsentrasi Ekonomi Regional yang turut berpartisipasi dalam memberikan semangat dan motivasi untuk penulis.
17. Teman – teman KKN 57 Desa Rowokangkung, Lumajang, Tiara, Arip, Rysang, Bang Ocit, Salma, Atul, Neni, Feli, Kikik, terima kasih telah

memberikan pengalaman selama 45 hari, semoga kekeluargaan ini selalu terjalin sampai kapanpun.

18. Teman – teman kos Jawa VII Aisyah, Hida, Dyah, yang merupakan *partner* selama di perantauan, memberikan keceriaan, suka, duka, Vivian (adik kos) sekeluarga, sekaligus teman tidur, terimakasih ya dik sudah mau melayani aku layaknya mbak kandungmu sendiri selama di kos.
19. Sahabat- sahabat SMW’s Family Saridon, Lina, Intan, Fitri, Dini (Endang), Elyn, Eka (Echo), Irmania (Tobi), Firla, serta Sahabat “Inframe” Inung, Earlyne, Aat, Desy, Arip Paat.
20. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu dalam dalam skripsi ini, terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya.

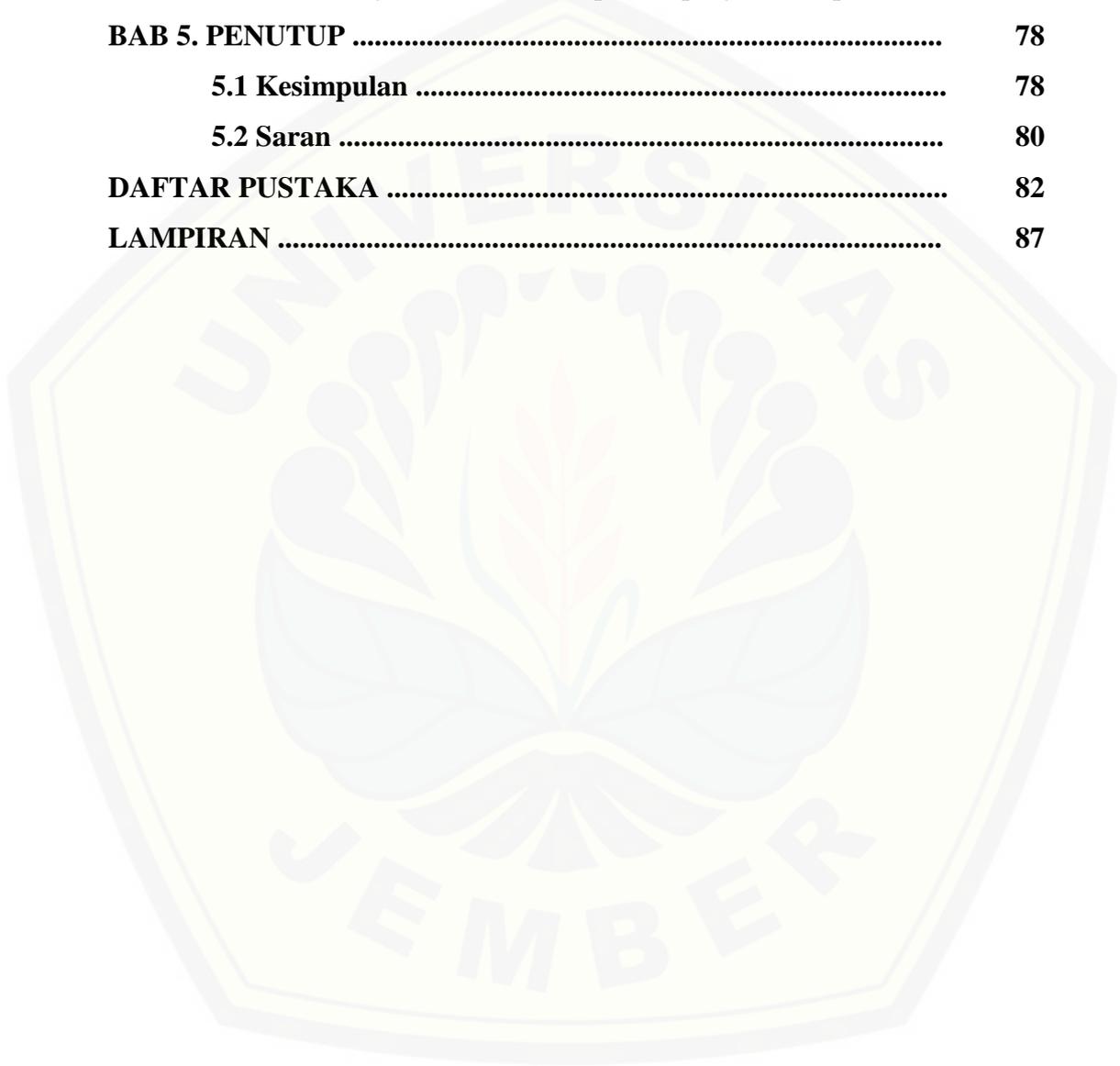
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu dengan senang hati penulis menerima setiap kritik dan saran yang membangun guna lebih meningkatkan kualitas karya skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas seluruh kebaikan yang kalian curahkan kepada penulis dikemudian hari, Aminn Yarobbal Alamin, dan semoga karya skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PEMBIMBING	v
HALAMAN TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
RINGKASAN	xi
PRAKATA	xiv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
DAFTAR SINGKATAN	xxiii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Landasan Teori	11
2.1.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi	11
2.1.2 Teori Kesenjangan Pembangunan	14
2.1.3 Hubungan Spasial	16
2.1.4 Keuangan Daerah	19
2.1.5 Investasi	20

2.2 Penelitian Sebelumnya	21
2.3 Kerangka Konseptual	29
2.4 Keaslian Penelitian	32
2.5 Hipotesis	32
2.6 Limitasi Penelitian	33
BAB 3. METODE PENELITIAN.....	34
3.1 Rancangan Penelitian	34
3.1.1 Jenis Penelitian	34
3.1.2 Waktu dan Tempat Penelitian	35
3.2 Metode Analisis Data	35
3.2.1 Prosedur Pengujian Model Spasial.....	35
3.2.2 Matrik Pembobot Spasial.....	36
3.2.3 Model Spasial <i>Lag</i> dan Model Spasial <i>Error</i>	39
3.2.4 Indeks Moran.....	39
3.2.5 Model Penelitian.....	41
3.2.6 <i>Lagrange Multiplier</i>	43
3.3 Definisi Operasional Variabel	44
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	46
4.1 Gambaran Umum Wilayah	46
4.1.1 Letak Geografis Indonesia	46
4.1.2 Kondisi Perekonomian Indonesia.....	49
4.2 Hasil Penelitian	52
4.2.1 Hasil Spasial Ekonometri	52
4.2.2 Hasil Pemilihan Model Spasial <i>Lag</i> dan Spasial <i>Error</i>	56
4.2.3 Hasil Estimasi Model Spasial <i>Lag</i>	58
4.3 Pembahasan	63
4.3.1 Pengaruh Aspek Spasial Terhadap Ketimpangan Pendapatan	65
4.3.2 Pengaruh PAD Terhadap Ketimpangan Pendapatan	66

4.3.3 Pengaruh PDRB per Kapita Terhadap Ketimpangan Pendapatan	68
4.3.4 Pengaruh DAU Terhadap Ketimpangan Pendapatan	71
4.3.5 Pengaruh PMDN Terhadap Ketimpangan Pendapatan	73
4.3.6 Pengaruh PMA Terhadap Ketimpangan Pendapatan	75
BAB 5. PENUTUP	78
5.1 Kesimpulan	78
5.2 Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN	87



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Indonesia Atas Dasar Harga Konstan 2010	3
Tabel 1.2 Indeks Rasio Gini 2015 Provinsi di Indonesia	4
Tabel 1.3 Pembagian Wilayah Provinsi di Indonesia	7
Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Sebelumnya	25
Tabel 4.1 Tiga Provinsi dengan Jumlah Penduduk Terbesar Berdasarkan Hasil SUPAS 2015	49
Tabel 4.2 Tiga Provinsi dengan Jumlah Penduduk Terkecil Berdasarkan Hasil SUPAS 2015	49
Tabel 4.3 Hasil Uji <i>Lagrange Multiplier</i> Wilayah I	57
Tabel 4.4 Hasil Uji <i>Lagrange Multiplier</i> Wilayah II	57
Tabel 4.5 Hasil Uji <i>Lagrange Multiplier</i> Wilayah III	58
Tabel 4.6 Hasil Estimasi Spasial <i>Lag</i>	58

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Perkembangan Indeks Wiliamson Antara Indonesia Bagian Barat Dan Indonesia Bagian Timur (Penelitian Ginting 2015)	6
Gambar 2.1 Ilustrasi Kurva Kuznet	15
Gambar 2.2 Kerangka Konseptual	31
Gambar 3.1 Prosedur Pengujian Model	36
Gambar 3.2 Ilustrasi Peta Matrik Pembobot Spasial	37
Gambar 3.3 <i>Moran scatterplot</i>	40
Gambar 4.1 Peta Indonesia	48
Gambar 4.2 <i>Moran's Scatterplot</i> Wilayah I	53
Gambar 4.3 Persebaran Indeks Gini pada Wilayah I	54
Gambar 4.4 <i>Moran's Scatterplot</i> Wilayah II	54
Gambar 4.5 Persebaran Indeks Gini pada Wilayah II	55
Gambar 4.6 <i>Moran's Scatterplot</i> Wilayah III	56
Gambar 4.7 Persebaran Indeks Gini Wilayah III	56

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A Data Variabel X dan Y	88
Lampiran B Data Rata-Rata	95
Lampiran C Data Log Rata-Rata	98
Lampiran D Data Pada Peta	101
Lampiran E Data Index Gini	104
Lampiran F <i>Weight Matrix</i>	106
Lampiran G Uji <i>Lagrange Multiplier</i>	108
Lampiran H Hasil Regresi Spasial	109
Lampiran I Grafik Indeks Moran	115

DAFTAR SINGKATAN

APBD	: Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah
BLM	: Bantuan Langsung Masyarakat
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
DAK	: Dana Alokasi Khusus
DAU	: Dana Alokasi Umum
DBH	: Dana Bagi Hasil
IBRD	: <i>International Bank of Reconstruction and Development</i>
IKLH	: Indeks kualitas lingkungan hidup
IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
MP3EI	: <i>Masterplan</i> Percepatan dan Perluasan Pembangunan
OECD	: <i>Organization for Economic Cooperation and Development</i>
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto
PMA	: Penanaman Modal Dalam Negeri
PMDN	: Penanaman Modal Asing
SAR	: <i>Spatial Autoregressive Model</i>
SDM	: Sumber Daya Manusia
SEM	: <i>Spatial Error Model</i>
SUPAS	: Survei Penduduk Antar Sensus
TPAK	: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPT	: Tingkat Pengangguran Terbuka
UMR	: Upah Minimum Regional

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang dilaksanakan dalam rangka menuju perekonomian negara menjadi lebih baik yang sifatnya jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang berdasarkan kebijakan-kebijakan yang nantinya dapat mempengaruhi kondisi perekonomian. Pertumbuhan ekonomi disuatu wilayah merupakan suatu proses yang berkelanjutan untuk menuju pembangunan yang lebih baik. (Boediono, 1981:1) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Ada beberapa kriteria yang perlu dilakukan untuk menuju pembangunan yang diinginkan misalnya dalam segi modal, kualitas sumber daya manusia, sumber daya alam, kestabilan politik, keamanan, jumlah penduduk, dll. pembangunan nasional bukanlah semata-mata agregasi atau gabungan atas pembangunan daerah/wilayah atau bahkan gabungan pembangunan antar sektor semata. Pembangunan nasional adalah hasil sinergi berbagai bentuk keterkaitan (*linkages*), baik keterkaitan institusional (*institutional linkages*) yang dapat dilakukan melalui beberapa sinergi yang lebih baik lagi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan swasta (MP3EI, 2011: 5).

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah biasanya juga dipengaruhi oleh mobilitas daerah-daerah tetangga yang ada. Jadi pada intinya pertumbuhan ekonomi saling memiliki keterkaitan dengan wilayah sekitarnya. Profesor Bert Hoselitz, “pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses yang tidak hanya mempengaruhi hubungan ekonomi tetapi keseluruhan tatanan sosial dan budaya masyarakat (Jhingan, 2003:46). Menurut pandangan klasik menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi meliputi beberapa faktor yaitu jumlah penduduk, jumlah barang modal, tanah, kekayaan alam, dan teknologi yang digunakan serta pemerintah tidak turut campur tangan akan kegiatan ekonomi yang dilaksanakan. Pembangunan di negara maju dan negara berkembang sangatlah berbeda. Negara maju lebih mudah dalam mengendalikan setiap permasalahan pembangunan yang terjadi, karena tingkat sumber daya manusianya sudah cukup kompeten,

ketersediaan modal memadai, dan faktor-faktor pendorong pembangunan memang tertata dengan baik sehingga mampu menghasilkan kesejahteraan bagi negaranya. Namun berbeda halnya dengan negara berkembang yang masih cenderung banyak mengalami permasalahan dalam perekonomian, baik dari segi modal yang belum memadai, sumberdaya manusia kurang kompeten, jumlah penduduk meningkat setiap tahunnya, dan distribusi pendapatan di masing-masing wilayah tidak merata. Pertumbuhan ekonomi tanpa diikuti oleh pemerataan ekonomi akan memperlebar jurang pemisah antara satu kelompok masyarakat dan kelompok lainnya, sementara pemerataan ekonomi tanpa pertumbuhan ekonomi sama halnya dengan meningkatkan kemiskinan suatu daerah (Rubiarko,2013).

Secara sektoral keberhasilan pembangunan ekonomi dapat diamati dalam bentuk terjadinya perubahan struktural (Sumodiningrat, 1998:14). Dari sisi inilah peningkatan produk domestik regional bruto (PDRB) dan pendapatan asli daerah (PAD) mempunyai peran penting dalam kontribusinya disetiap sektor yang ada. Dalam pandangan Kuznet menjelaskan bahwa semakin tinggi PDRB atau PDRB perkapita maka akan semakin besar tingkat ketimpangan pendapatan yang terjadi karena akan semakin menunjukkan perbedaan kaum miskin dan kaum kaya. Dalam jangka pendek pertumbuhan ekonomi dengan kesenjangan berkorelasi positif dimana pendapatan meningkat maka kesenjangan akan meningkat, namun dalam jangka panjang keduanya berhubungan negatif dimana meningkatnya pendapatan akan mengurangi tingkat kesenjangan.

Indonesia merupakan termasuk dalam konteks negara berkembang yang sampai saat ini masih mengalami masalah dalam pembangunan nasional. Secara lengkap kinerja ekonomi 2010 telah diumumkan oleh BPS pada 7 Februari 2010. Pertumbuhan ekonomi seperti yang sudah diramalkan banyak kalangan, tumbuh lebih tinggi dari asumsi pemerintah yakni 6,1 persen (asumsi pemerintah 5,8 persen). Jika dilihat dari lapangan usaha (sektor) maka sektor pertanian tumbuh 2,9 persen; pertambangan dan penggalian 3,5persen; industri pengolahan 4,5 persen; listrik, gas, dan air bersih 5,3 persen; kontruksi 7,0 persen; perdagangan, hotel, dan restoran 8,7 persen; pengangkutan dan komunikasi 13,5 persen;

keuangan, real estat, dan jasa 5,7 persen; dan jasa-jasa 6,0 persen (Yustika, 2011:247).

Indonesia merupakan negara kepulauan agraris yang terdiri dari beberapa pulau dengan total provinsi sebanyak 34 provinsi. Dari masing-masing provinsi yang ada, mempunyai potensi dan keanekaragaman yang berbeda. Namun walaupun begitu ketidakmerataan pembangunan masih belum stabil. Seperti halnya pembangunan dan pusat-pusat industri lebih berkembang di Indonesia bagian barat lebih tepatnya di Pulau Jawa dan sekitarnya.

Tabel 1.1 PDRB Indonesia Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Milyar Rupiah)

No.	Tahun	PDRB
1.	2010	6864133,1
2.	2011	7259715,23
3.	2012	7937385,48
4.	2013	8177822,29
5.	2014	8202473,6
6.	2015	9031054,85

Sumber: BPS Diolah

Dari Tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa pergerakan PDRB Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dan di tahun 2015 mencapai angka 9.031.054,85 milyar rupiah. Namun dengan adanya peningkatan total PDRB ini, belum tentu menunjukkan tingkat keseimbangan pembangunan dalam setiap provinsi yang ada. Dalam data *world bank* menjelaskan bahwa dalam waktu lima belas tahun terakhir bahwa Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang kuat, dan telah mengurangi tingkat kemiskinan dan memperlebar jumlah kelas menengah. Namun dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat ini lebih cenderung dinikmati oleh 20 persen masyarakat kaya, dan sekitar 80 persen penduduk atau lebih dari 205 juta orang rawan merasa tertinggal. Survei persepsi masyarakat tahun 2014 mengenai ketimpangan menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia menilai distribusi pendapatan sangat tidak merata, lebih dari 61 persen responden mengatakan bahwa mereka dapat menerima pertumbuhan ekonomi yang rendah asalkan tingkat ketimpangan berkurang.

Dalam laporan (*Organization for Economic Cooperation and Development, 2015*) disingkat OECD menjelaskan bahwa Indonesia kemiskinan sebagian besar, namun tidak semata-mata, ditemukan di wilayah pedesaan dan pertanian yang merupakan tempat tinggal dari sekitar separuh jumlah penduduknya. Pada tahun 2012, 14,3 persen penduduk desa berada di bawah garis kemiskinan pedesaan bila dibandingkan dengan penduduk kota yang hanya sebesar 8,4 persen, Bank Dunia (2012) memperkirakan bahwa 40 persen rakyat Indonesia memiliki kerentanan yang tinggi terhadap kemiskinan.

Tabel 1.2 Indeks Rasio Gini 2015 Provinsi Di Indonesia (Dalam Persen)

No.	Provinsi	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Aceh	0,33	0,32	0,34	0,32	0,33
2.	Sumatera Utara	0,35	0,33	0,35	0,32	0,34
3.	Sumatera Barat	0,35	0,36	0,36	0,33	0,34
4.	Riau	0,36	0,4	0,37	0,35	0,36
5.	Jambi	0,34	0,34	0,35	0,33	0,36
6.	Sumatera Selatan	0,34	0,4	0,38	0,4	0,36
7.	Bengkulu	0,36	0,35	0,39	0,36	0,38
8.	Lampung	0,37	0,36	0,36	0,35	0,38
9.	Kep. Bangka Belitung	0,3	0,29	0,31	0,3	0,28
10.	Kep. Riau	0,32	0,35	0,36	0,4	0,36
11.	DKI Jakarta	0,44	0,42	0,43	0,43	0,43
12.	Jawa Barat	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
13.	Jawa Tengah	0,38	0,38	0,39	0,38	0,38
14.	DI Yogyakarta	0,4	0,43	0,44	0,42	0,43
15.	Jawa Timur	0,37	0,36	0,36	0,37	0,42
16.	Banten	0,4	0,39	0,4	0,4	0,4
17.	Bali	0,41	0,43	0,4	0,42	0,38
18.	Nusa Tenggara Barat	0,36	0,35	0,36	0,38	0,37
19.	Nusa Tenggara Timur	0,36	0,36	0,35	0,36	0,34
20.	Kalimantan Barat	0,4	0,38	0,4	0,39	0,33
21.	Kalimantan Tengah	0,34	0,33	0,35	0,35	0,33
22.	Kalimantan Selatan	0,37	0,38	0,36	0,36	0,35
23.	Kalimantan Timur	0,38	0,36	0,37	0,35	0,32
24.	Kalimantan Utara	0,33	0,36	0,33	0,33	0,29
25.	Sulawesi Utara	0,39	0,43	0,42	0,42	0,37
26.	Sulawesi Tengah	0,38	0,4	0,41	0,37	0,37
27.	Sulawesi Selatan	0,41	0,41	0,43	0,42	0,42
28.	Sulawesi Tenggara	0,41	0,4	0,43	0,41	0,4
29.	Gorontalo	0,46	0,44	0,44	0,41	0,42

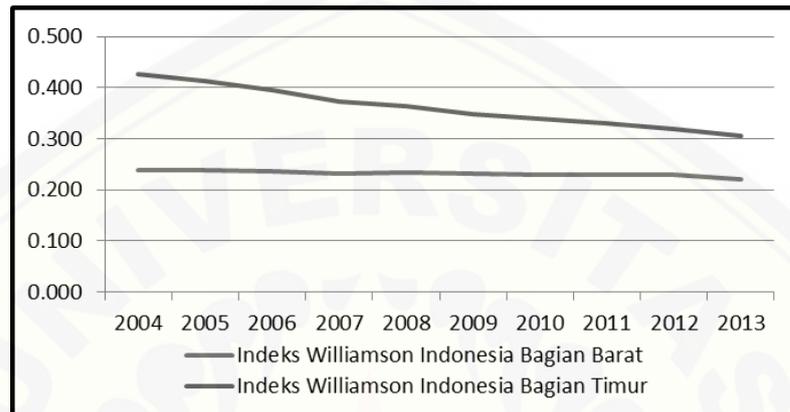
No.	Provinsi	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
30.	Sulawesi Barat	0,34	0,31	0,35	0,35	0,36
31.	Maluku	0,41	0,38	0,37	0,35	0,34
32.	Maluku Utara	0,33	0,34	0,32	0,32	0,28
33.	Papua Barat	0,4	0,43	0,43	0,44	0,44
34.	Papua	0,42	0,44	0,44	0,41	0,42

Sumber: BPS diolah

Dari Tabel indeks gini diatas menunjukkan ketimpangan pendapatan secara keseluruhan. Angka indeks gini nilainya berkisar antara 0 sampai dengan 1. Jika bernilai 0 maka menunjukkan terjadi pemerataan pendapatan secara sempurna atau dengan kata lain tingkat ketimpangan membaik. Sedangkan jika bernilai 1 maka pemerataan pendapatan tidak sempurna atau tingkat ketimpangan memburuk.

Studi (Suliswanto, 2010) menjelaskan mengenai angka kemiskinan di Indonesia bahwa variabel PDRB tidak terlalu besar dalam kontribusinya mengurangi angka kemiskinan melainkan lebih besar variabel Indeks pembangunan manusia (IPM). Dalam penelitian (Ginting, 2015) menunjukkan bahwa dari tahun 2004 sampai 2013 tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan dalam jumlah kemiskinan dan ketimpangan wilayah dengan variabel investasi, aglomerasi, kemiskinan, ketimpangan pembangunan, dan PDRB, namun persentase penduduk miskin menurut provinsi lebih banyak di wilayah Indonesia bagian timur dibandingkan bagian barat, yang pada intinya pembangunan di Indonesia timur memang juga terjadi namun tidak sebanding dengan indonesia bagian barat. Sedangkan dalam studi (Dhyatmika, 2013) menjelaskan bahwa ketimpangan pembangunan cenderung meningkat dimana penanaman modal asing (PMA) berdampak positif terhadap ketimpangan, dalam artian bahwa jika PMA naik maka tingkat ketimpangan antar wilayah juga naik sebagai akibat penyebaran PMA yang tidak merata. Namun dalam pandangan Harod-Domar menjelaskan bahwa justru dengan adanya investasi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sebagai proses dari akumulasi modal yang terus bergerak dalam perekonomian. Investasi memang mendorong kearah pembangunan yang lebih baik. Namun akan

buruk apabila hanya terkonsentrasi pada wilayah-wilayah yang relatif maju, sedangkan wilayah yang kurang berkembang tidak terlalu terindikasi. Hal ini akan menimbulkan kesenjangan dalam wilayah negara dimana daerah yang maju akan semakin maju, sedangkan wilayah yang tertinggal akan semakin tertinggal.



Gambar 1.1 Perkembangan Indeks Williamson antara Indonesia Bagian Barat dan Indonesia Bagian Timur (*Penelitian Ginting 2015*)

Berdasarkan Gambar 1.1 diatas dapat dilihat tingkat perbedaan nilai indeks williamson yang jauh antara wilayah barat Indonesia sebesar 0,239 dan wilayah timur Indonesia sebesar 0,42585 (Ginting, 2015). Indeks williamson mendekati 0 maka ketimpangan rendah, dan sebaliknya jika nilainya mendekati 1 maka tingkat ketimpangan memburuk. Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 / Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 / Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, adalah menunjukkan sebuah kebijakan dimana pemerintah pusat memberikan wewenang terhadap daerahnya untuk megatur segala aktivitas terutama dalam pelaksanaan pelayanan publik. Dengan adanya peraturan ini akan lebih mempermudah pemerintah pusat dalam mengatur perekonomian karena setiap daerah telah diberi kewenangan masing-masing mengembangkan wilayahnya. Biasanya daerah yang relatif maju berdampak pada perekonomian daerah disekitarnya. Pembangunan wilayah antar provinsi yang bertetangga dapat mengembangkan daya pertumbuhan yang kuat yang terdapat dalam lingkungan sesuatu provinsi dan dapat mendorong pula perkembangan-perkembangan

provinsi-provinsi lainnya yang relatif terbelakang (Adisasmita, 2005:98). Untuk mempermudah menganalisis data maka wilayah Indonesia akan dibagi menjadi enam koridor wilayah sesuai yang tertera dalam *Masterplan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Dimana enam koridor tersebut meliputi Koridor Sumatera, Koridor Jawa, Koridor Bali-Nusa Tenggara, Koridor Kalimantan, Koridor Sulawesi, dan Koridor Papua-Kep. Maluku. Dari keenam koridor ini mempunyai potensi ekonomi yang berbeda-beda, berdasarkan MP3EI 2011-2025, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yaitu:

1. Koridor Sumatera merupakan sentra produksi dan pengolahan hasil bumi dan lumbung energi nasional.
2. Koridor Kalimantan merupakan pusat produksi dan pengolahan hasil tambang dan lumbung energi nasional.
3. Koridor Jawa merupakan pendorong industri dan jasa nasional.
4. Koridor Bali-Nusa Tenggara merupakan pintu gerbang pariwisata dan pendukung pangan nasional
5. Koridor Sulawesi merupakan pusat pengolahan hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan nasional, serta pertambangan nikel nasional
6. Koridor Papua-Maluku merupakan pusat pengembangan pangan, perikanan, energi dan pertambangan nasional, serta pengolahan sumber daya alam yang melimpah dan sumber daya manusia (SDM) yang sejahtera.

Namun demikian dalam menganalisisnya, wilayah enam koridor ini akan dibagi menjadi 3 bagian berdasarkan kedekatan antar provinsi dan kemiripan potensi wilayah yang dimiliki berdasarkan data MP3EI diatas, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.3 Pembagian Wilayah Provinsi di Indonesia

Wilayah I	Wilayah II	Wilayah III
Koridor Sumatera:	Koridor Jawa:	Koridor Sulawesi:
1. Aceh	1. DKI Jakarta	1. Sulawesi Utara
2. Sumatera Utara	2. Jawa Barat	2. Sulawesi Tengah
3. Sumatera Barat	3. Jawa Tengah	3. Sulawesi Selatan
4. Riau	4. DI Yogyakarta	4. Sulawesi Tenggara
5. Jambi	5. Jawa Timur	5. Gorontalo
6. Sumatera Selatan	6. Banten	6. Sulawesi Barat
7. Bengkulu		

Wilayah I	Wilayah II	Wilayah III
8. Lampung	Bali-Nusa Tenggara:	Papua-Kep. Maluku:
9. Kep. Bangka Belitung	7. Bali	7. Maluku
10. Kep. Riau	8. Nusa Tenggara Barat	8. Maluku Utara
Koridor Kalimantan:	9. Nusa Tenggara Timur	9. Papua Barat
11. Kalimantan Barat		10. Papua
12. Kalimantan Tengah		
13. Kalimantan Selatan		
14. Kalimantan Timur		
15. Kalimantan Utara		

Sumber: MP3EI Diolah

Dalam studi (Laswinia dan Chamid, 2016) mengenai pola hubungan spasial penduduk miskin dengan faktor lingkungan dan sosial ekonomi bahwa keragaman pembangunan terjadi pada variabel kepadatan penduduk, sedangkan variabel kepadatan persentase penduduk miskin terjadi hubungan antar lokasi dimana provinsi yang letak geografisnya semakin ke timur memiliki persentase penduduk miskin yang semakin tinggi. Adanya perbedaan atau variasi antar pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan masing-masing wilayah akan menimbulkan permasalahan baru yakni kesenjangan antar wilayah. Untuk itu diharapkan setiap daerah memiliki suatu hubungan atau keterkaitan dalam melaksanakan proses pembangunan. (Adisasmita, 2005:99) dilihat dari pertimbangan integrasi nasional, salah satu fungsi pengembangan wilayah adalah membina dan mengefektifkan keterhubungan dan ketergantungan antar wilayah yang berspesialisasi secara fungsional dan berorientasi pada pasar secara nasional. Dengan demikian dimaksudkan bahwa untuk meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan melalui pengelompokan antar wilayah untuk menciptakan hubungan spasial agar kegiatan ekonomi lebih efektif terutama bagi daerah yang kurang berkembang. Dalam penelitian ini menjelaskan mengenai beberapa variabel ekonomi diantaranya PAD, dana alokasi umum (DAU), PDRB per kapita, PMA, dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di wilayah studi dengan menghubungkan ada tidaknya dampak spasial yang terjadi.

1.2 Rumusan Masalah

Struktur perekonomian yang berbeda di masing-masing wilayah studi akan menyebabkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang berbeda. Pusat pertumbuhan ekonomi dapat diartikan secara fungsional dan geografis. Secara fungsional memiliki dampak dinamis dan mampu menstimulus perekonomian kedalam ataupun keluar (daerah tetangga), sedangkan geografis suatu wilayah yang mempunyai fasilitas dan kemudian menjadi daya tarik usaha walaupun kemungkinan tidak ada interaksi antar usaha tersebut (Tarigan, 2005: 162). Dari uraian latar belakang diatas dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak disparitas spasial yang terjadi antar provinsi di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh variabel PAD terhadap disparitas antar Provinsi di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh variabel DAU terhadap disparitas antar Provinsi di Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh variabel PDRB perkapita terhadap disparitas antar Provinsi di Indonesia?
5. Bagaimana pengaruh variabel PMA terhadap disparitas antar Provinsi di Indonesia?
6. Bagaimana pengaruh variabel PMDN terhadap disparitas antar Provinsi di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dampak disparitas spasial yang terjadi antar provinsi di Indonesia.
2. Untuk menganalisis pengaruh variabel PAD terhadap disparitas antar Provinsi di Indonesia.
3. Untuk menganalisis pengaruh variabel DAU terhadap disparitas antar Provinsi di Indonesia.

4. Untuk menganalisis pengaruh variabel PDRB perkapita terhadap disparitas antar Provinsi di Indonesia.
5. Untuk menganalisis pengaruh variabel PMA terhadap disparitas antar Provinsi di Indonesia.
6. Untuk menganalisis pengaruh variabel PMDN terhadap disparitas antar Provinsi di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat bagi peneliti sendiri adalah sebagai bahan pembelajaran dapat mengetahui bagaimana proses dan analisa mengenai pertumbuhan ekonomi yang mengikutsertakan unsur spasial antar wilayah studi. Untuk umum diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kasus yang sama dan juga sebagai sumber kajian bagi penelitian selanjutnya. Sedangkan untuk pemerintah atau instansi terkait diharapkan dapat menjadi dasar sebagai bahan penetapan kebijakannya apa yang nantinya sesuai untuk pengembangan daerahnya.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka dalam bab ini berisi mengenai literatur yang digunakan dalam membahas masalah penelitian yang terdiri dari landasan secara teori yang merupakan studi literatur berdasarkan berbagai teori-teori yang sesuai dengan permasalahannya, sedangkan landasan secara empiris atau penelitian sebelumnya merupakan studi literatur dari berbagai penelitian sebelumnya yang sejenis dengan penelitian ini.

2.1 Landasan Teori

Landasan teori merupakan suatu kerangka berfikir baik secara teoritis ataupun empiris yang digunakan sebagai dasar acuan dalam melakukan penelitian. Landasan teori bukanlah seberapa banyak teori yang akan digunakan, melainkan seberapa aplikatifnya teori tersebut dalam penelitian (Sugiarto, 2015:44)

2.1.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu kondisi dimana suatu negara berada dalam posisi tumbuh dalam hal ekonomi misalnya meliputi adanya peningkatan pendapatan nasional, tingkat inflasi terkendali, pengangguran minim, iklim politik stabil, dll yang menyangkut variabel makro ekonomi. Menurut pandangan klasik menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi meliputi beberapa faktor yaitu jumlah penduduk, jumlah barang modal, tanah, kekayaan alam, dan teknologi yang digunakan serta pemerintah tidak turut campur tangan akan kegiatan ekonomi yang dilaksanakan.

Dalam konsep teori Harod-Domar dimana teori ini merupakan sebagai teori yang melengkapi dari teori Keynes, dimana Keynes melihat dalam jangka pendek (kondisi statis) sedangkan Haro-Domar melihatnya dalam jangka panjang (kondisi dinamis) (Tarigan, 2003:49). Dalam teorinya terdapat beberapa asumsi yaitu:

1. Perekonomian bersifat tertutup
2. MPS adalah konstan
3. Proses produksi memiliki koefisien yang tetap

4. Pertumbuhan angkatan kerja konstan dan sama dengan tingkat pertumbuhan penduduk.

Diketahui bahwa rasio modal output adalah k , rasio tabungan nasional adalah s , tabungan total S , maka model pertumbuhannya:

1. Tabungan (S) adalah bagian dalam jumlah tertentu, atau s , dari pendapatan (Y) maka : $S = sY$ (1)

2. Investasi neto (I) didefinisikan sebagai perubahan stok modal (ΔK) maka:
 $I = \Delta K$ (2)

Karena jumlah stok modal K mempunyai hubungan langsung dengan jumlah pendapatan nasional atau output Y , dan rasio modal output adalah k maka:

$$\frac{K}{Y} = k \text{ atau } \frac{\Delta K}{\Delta Y} = k$$

Atau $\Delta K = k\Delta Y$ (3)

Mengingat tabungan nasional neto (S) harus sama dengan investasi neto (I) , maka persamaan berikutnya: $S = I$ (4)

Dari persamaan (1) bahwa $S = sY$ dan persamaan (2) dan (3) bahwa $I = \Delta K = k\Delta Y$

Dengan demikian keseimbangan tabungan dan investasi dalam persamaan (4) yaitu: $S = sY = k\Delta Y = \Delta K = I$ (5)

Atau $sY = k\Delta Y$ (6)

Jika kedua sisi persamaan 6 dibagi mla-mula dengan Y dan kemudian dengan k , maka didapat: $\frac{\Delta Y}{Y} = \frac{s}{k}$ (7)

Dari persamaan (7) diatas bahwa $\Delta Y/Y$ sebenarnya merupakan tingkat perubahan atau tingkat pertumbuhan GDP. Pertumbuhan GDP ditentukan secara bersama-sama oleh rasio tabungan nasional s , serta raio modal output k . Tanpa adanya campur tangan pemerintah tingkat pertumbuhan pendapatan nasional akan secara positif berbanding lurus dengan rasio tabungan (semakin banyak GDP yang ditabung dan diinvestasikan maka akan lebih besar lagi pertumbuhann GDP yang dihasilkan) dan secara negatif atau terbalik terhadap rasio modal output dari suatu perekonomian (semakin besar rasio modal output k maka tingkat pertumbuhan GDP semakin rendah) (Todaro dan Smith, 2006:129-129).

Dalam teori pembangunan tak seimbang dijelaskan bahwa pembangunan hanya ditekankan pada sektor-sektor yang potensial saja dibanding dilakukan disemua sektor. Karena dalam pengertiannya negara berkembang tidak memiliki banyak modal untuk membiayai pembangunan di semua sektor perekonomian. sehingga dengan melakukan investasi hanya di sektor yang potensial diharapkan hasilnya akan mampu digunakan untuk membangun sektor lain yang tadinya kurang berpotensi. Dengan demikian lama kelamaan dengan cara bertahap pembangunan ekonomi akan berjalan kearah pembangunan seimbang. Salah satu tokoh dari teori ini adalah Kindleberger. Sedangkan menurut Gunnar Myrdal bahwa pembangunan ekonomi menghasilkan proses sirkuler dimana kaum kapitalis akan mendapat keuntungan yang semakin banyak sedangkan mereka yang tertinggal akan semakin terbelakang.

John Fei dan Gustav Ranis dalam bukunya *A Theory of Economics Development* dimana menyempurnakan model Lewis, bahwa negara terbelakang yang sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian yang relatif terhenti, bidang non pertanian memang ada namun tidak begitu banyak menggunakan modal. Disana juga terdapat sektor industri yang dinamis. Dalam teorinya terdapat beberapa asumsi diantaranya:

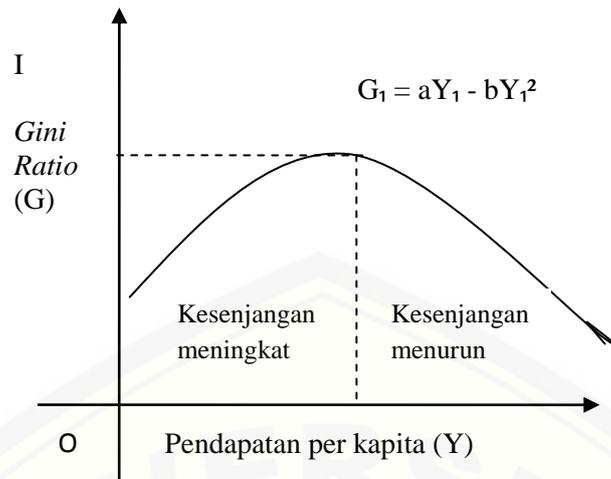
1. Ada ekonomi sektor pertanian tradisional yang terhenti dan industri yang aktif
2. Output pertanian adalah fungsi dari tanah dan buruh saja.
3. Di sektor pertanian tidak ada akumulasi modal selain dalam bentuk penggarapan tanah kembali
4. Persediaan atau penawaran tanah bersifat tetap
5. Kegiatan pertanian ditandai dengan hasil (*return to scale*) yang tetap dengan buruh sebagai faktor
6. Produktifitas marginal buruh nol jika penduduk melampaui jumlah dimana produktifitas marginal buruhnya nol, buruh dapat dialihkan ke sektor industri tanpa mengurangi output pertanian
7. Output industri fungsi dari modal dan buruh saja, tanah tidak mempunyai peranan sebagai faktor produksi
8. Pertumbuhan penduduk dianggap sebagai fenomena eksogen

9. Upah nyata di sektor industri dianggap tetap dan sama dengan tingkat pendapatan nyata (sebelumnya) sektor pertanian. Dan menyebutnya upah institusional
10. Pekerja di masing-masing sektor hanya mengkonsumsi produk pertanian

Fei dan Ranis menjelaskan bahwa tenaga kerja pertanian beralih ke sektor industri maka mulai terjadi surplus di sektor pertanian. Dalam konsepnya bahwa menerapkan konsep pertumbuhan berimbang dimana menghendaki investasi secara seimbang di sektor pertanian dan industri.

2.1.2 Teori Kesenjangan Pembangunan

Kesenjangan wilayah dapat terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor misalnya adanya perbedaan sumber daya yang tersedia, dari segi penerimaan pemerintah, investasi asing ataupun investasi dalam negeri. Apabila suatu wilayah (Provinsi) dalam negara memiliki tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi dibanding wilayah (Provinsi) lainnya dan secara berkelanjutan dan otomatis pembangunan hanya berpusat di wilayah tersebut sedangkan wilayah yang berada jauh dari pusat pertumbuhan masih tertinggal maka bisa dikatakan telah terjadi disparitas antar wilayah. Simon Kuznet dimana dalam hipotesisnya membahas mengenai hubungan antara pembangunan ekonomi nasional dengan tingkat ketimpangan wilayah mengatakan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan cenderung memburuk, namun pada tahap selanjutnya, distribusi pendapatan akan membaik. Hipotesis Kuznet yang terkenal ini adalah kurva U terbalik (Todaro dan Smith, 2006: 253).



Gambar 2.1 Ilustrasi Kurva Kuznet

Dari gambar 2.1 diatas menunjukkan bahwa diawal pembangunan tingkat kesenjangan justru meningkat, sedangkan seiring berjalannya waktu tingkat kesenjangan menurun tampak seperti gambar diatas. Kurva Kuznet dihasilkan dari pembangunan yang berkelanjutan dari sektor pertanian ke sektor modern. Tidak hanya itu juga adanya investasi modal pembanguna manusia atau dalam hal pendidikan juga menjadi faktor keberlangsungan pembangunan. Dalam konsep teori Kuznet dijelaskan bahwa proses pembangunan dilaksanakan di negara sedang berkembang justru ketimpangan meningkat karena pada waktu prsoses pembangunan baru dimulai di negara sedang berkembang, kesempatan dan peluang pembangunan yang ada umumnya dimanfaatkan oleh daerah-daerah yang kondisi pembangunan sudah lebih baik. Sedangkan daerah yang masih sangat terbelakang tidak mampu memanfaatkan peluang ini karena keterbatasan prasarana dan saran serta rendahnya kualitas sumberdaya manusia (Sjafrizal, 2008:106). Kuznet menjelaskan bahwa semakin tinggi PDRB atau PDRB perkapita maka akan semakin besar tingkat ketimpangan pendapatan yang terjadi karena akan semakin menunjukkan perbedaan kaum miskin dan kaum kaya. Dalam jangka pendek pertumbuhan ekonomi dengan kesenjangan berkorelasi positif dimana pendapatan meningkat maka kesenjangan akan meningkat, namun

dalam jangka panjang keduanya berhubungan negatif dimana meningkatnya pendapatan akan mengurangi tingkat kesenjangan.

Dalam model pembangunan Myrdal bahwa akan ada dampak balik (*spread effect*) dan dampak sebar (*spread effect*) dalam suatu perekonomian. Dimana dampak balik merupakan suatu perubahan yang merugikan sedangkan dampak sebar adalah pembangunan yang menyebar secara *sentrifugal* atau secara semu yang pergerakannya semakin menjauh tersebar dari pusat-pusat potensial ke wilayah-wilayah yang lainnya yang sifatnya positif. Sedangkan dampak balik merupakan dampak yang mempunyai pengaruh positif bagi wilayah sekitar sehingga dapat mengakibatkan ketidakseimbangan persebaran kegiatan ekonomi yang baik yang seharusnya saling berkesinambungan antara wilayah satu dengan wilayah sekitar. Apabila dampak balik lebih besar pengaruhnya daripada dampak sebar maka hal inilah yang menyebabkan ketimpangan antar wilayah. Sebab utama ketimpangan regional menurut Myrdal adalah kuatnya dampak balik dan lemahnya dampak sebar di negara terbelakang (Jhingan, 2003:212). Menurut Lay (1993:5) indikator ketimpangan distribusi pendapatan ekonomi daerah adalah tingkat kesejahteraan penduduk, kualitas pendidikan, pola penyebaran dan konsentrasi investasi dan ketersediaan sarana prasarana, serta infrastruktur lainnya (ditjenpdt.kemendesa.go.id).

2.1.3 Hubungan Spasial

Hubungan spasial dalam suatu wilayah merupakan keterkaitan kegiatan ekonomi ataupun kegiatan lainnya antar daerah satu dengan daerah tetangga yang berdekatan (Laswinia *et al.*, 2016). Regresi spasial merupakan analisis untuk mengetahui keterkaitan beberapa variabel dependen dengan memperhatikan keterkaitan efek lokasi. Anselin (2003) dalam Pamungkas (2009) membagi aspek geografis berupa jarak antara wilayah satu dengan yang lain, perbatasan langsung antar wilayah (*neighborhood*) dan *social distance* seperti kemiripan ekonomi, sosial dan budaya antar wilayah. Dalam perencanaan dan pengembangan wilayah perlu mempertimbangkan aspek lokasi dan ekonomi. Aspek spasial merupakan suatu fenomena alami yang timbul sebagai akibat dari interaksi kegiatan oleh

wilayah tertentu yang saling berkaitan dengan wilayah lainya yang letaknya berdekatan dibandingkan lokasi yang letaknya relatif berjauhan. Hukum geografi “Tobler” yang pertama menyebutkan bahwa “*setiap hal memiliki keterkaitan dengan hal lainnya, namun yang lebih berdekatan memiliki keterkaitan lebih dari lainnya*” (Rustiadi *et al.*, 2011).

Efek spasial dibedakan menjadi dua bagian, yaitu *spatial autocorrelation* dan *spatial heterogeneity*. *Spatial autocorrelation* terjadi akibat adanya dependensi dalam data regional, sedangkan *spatial heterogeneity* terjadi akibat adanya perbedaan antara satu region dengan region lainnya (efek region random). (Anselin, 1998 dalam Rahayu dan Romzi, 2012). Bambang Juanda ilustrasi riset harmes) data spasial adalah data yang bereferensi geografis (memiliki koordinat lokasi X, Y (*Latitude* = garis lintang utara/selatan equator), *longitude* = garis bujur timur/ barat standar meridium di Greenwich). Bentuk data spasial terdiri dari empat bagian yaitu titik (*point*), poligon, garis (*line*), dan permukaan bumi (*surface*).

A. Teori Perroux (*Growth Poles*)

Perroux (1955) disini menunjukkan adanya inovasi baru yang dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi diwilayah lainnya dengan memerlihatkan adanya kaitan erat antara, skala, dominasi, dan dorongan-dorongan untuk melakukan penemuan yang memicu timbulnya industri baru. Pemikiran dasar teori ini adalah adanya konsep titik pertumbuhan atau kutub pertumbuhan (*pole de croissance/growth poles*) (Kembauw *et al.*, 2015:17). Teori ini menunjukkan faktor utama pengembangan wilayah dimana sektor industri merupakan penggerak utama dari kutub pertumbuhan. Berikut ciri-ciri pertumbuhan menurut Perroux:

- 1) Tingkat konsentersasi atau pengaruh yang tinggi
- 2) Pengaruh polarisasi lokal yang sangat besar
- 3) Teknologi yang sudah maju
- 4) Tingkat manajerial yang modern

Dalam teorinya kutub pertumbuhan tidak hanya sebagai industri pendorong, namun juga pertumbuhan yang terjadi diharapkan mampu

mempengaruhi wilayah lain disekitarnya. Diperlukan interaksi antara kutub-kutub pertumbuhan dengan wilayah yang terpengaruh sehingga, dalam hal ini ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan yaitu:

- 1) Dapat menimbulkan ketidakseimbangan struktural di wilayahnya yang disebabkan karena perbedaan kesejahteraan antara kutub pertumbuhan dengan wilayah tetangga (*new industrial complex*).
- 2) Adanya pemusatan (aglomerasi) industri pendorong (*propulsive industries*) dan industri utama (*key industries*) sedangkan tenaga kerja, bahan mentah, dan jasa lainnya tersebar ke seluruh wilayah yang terpengaruh.
- 3) Fungsi tempat sentral dari kutub pertumbuhan dapat memperjelas hubungan antar kutub pertumbuhan dengan wilayah yang terpengaruh. Tempat sentral yang jumlahnya banyak tidak identik dengan kutub pertumbuhan yang jumlahnya hanya sedikit dan terbatas dalam suatu wilayah. Perbedaan antara kutub pertumbuhan dengan tempat sentral ialah yang menopang pertumbuhan tempat sentral ialah wilayah komplementernya, dan yang menopang wilayah yang terpengaruh adalah wilayah kutub pertumbuhan.

B. Teori Hirschman (*Trickling Down*)

Teori Hirschman (1958) lebih fokus kepada pertumbuhan tak seimbang, dimana pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh kemajuan-kemajuan di suatu wilayah pada satu titik tempat yang menimbulkan dorongan ke arah perkembangan titik-titik atau tempat-tempat wilayah berikutnya (Kembauw *et al.*, 2015:19). Teori ini melihat fungsi ekonomi suatu wilayah dimana adanya intensitas yang berbeda untuk setiap tempat yang berbeda pula. Perkembangan wilayah dimulai dari titik original (*growing point* atau *growing center*) sebelum menyebar ke wilayah lainnya. Keberlanjutan teori ini ialah dimana pembangunan berfokus di beberapa titik pertumbuhan yang aktivitasnya cenderung berkelompok karena saling memiliki kemudahan dan manfaat sebagai penunjang kegiatan ekonomi antar wilayah tersebut. namun dampak pemusatan dapat dilihat dari bersanya tingkat migrasi penduduk ke pusat wilayah sehingga dapat dilihat antar wilayah yang saling bergantung tersebut. Dengan demikian prosesnya cenderung

mengalami perbedaan, namun seiring berjalannya waktu (jangka panjang) perbedaan tersebut akan menurun dengan sendirinya yang terjadi di wilayah sekitar pusat.

Kesimpulan dari teori Hirschman ini ialah proses pembangunan yang nantinya akan berdampak positif atau menyebar ke wilayah tetangga (*trickling down*), namun sebaliknya jika lemah maka akan mengakibatkan polarisasi pertumbuhan dimana wilayah kota yang semakin maju sedangkan wilayah pedesaan yang terbelakang. Namun Hirschman optimis bahwa pengaruh *trickling down* akan mampu mengatasi polarisasi yang terjadi di wilayah-wilayah tetangga terbelakang, dan harus mampu mendorong pembangunan di pedesaan yang nantinya menciptakan pengaruh penyebaran pembangunan yang lebih efektif. Sehingga dalam jangka panjang pembangunan wilayah pusat dengan wilayah pedesaan akan merata ke seluruh wilayah disekitarnya.

2.1.4 Keuangan Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 / Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 / Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, adalah menunjukkan sebuah kebijakan dimana pemerintah pusat memberikan wewenang terhadap daerahnya untuk mengatur segala aktivitas terutama dalam pelaksanaan pelayanan publik. Dengan adanya peraturan ini akan lebih mempermudah pemerintah pusat dalam mengatur perekonomian karena setiap daerah telah diberi kewenangan masing-masing mengembangkan wilayahnya. Biasanya daerah yang relatif maju berdampak pada perekonomian daerah disekitarnya. Seperti yang tercantum dalam Bab VII pasal 78 sampai 86 telah diatur secara jelas tentang sumber-sumber pendapatan daerah yang terdiri dari PAD, dana perimbangan, pinjaman daerah dan pendapatan daerah lainnya yang sah (Haris *et al.*, 2006:124).

Kebijakan keuangan daerah diharapkan dapat meningkatkan kualitas daerah terutama dalam segi pendapatan sehingga nantinya berdampak pada pembangunan berkelanjutan. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu indikator untuk menambah pendanaan yang nantinya digunakan untuk membiayai

pengeluaran pemerintah daerah itu sendiri. Dalam catatan BAPPENAS (2012) langkah konkrit dalam jangka pendek yang perlu dilakukan pemerintah adalah:

1. Melakukan perbaikan dari pengukuran *inequality of opportunity*;
2. Memastikan anggaran pemerintah dialokasikan lebih optimum selain untuk mengurangi kemiskinan juga memastikan *equality of opportunity* di sektor-sektor yang terkait peningkatan kualitas SDM (pendidikan dan kesehatan) agar semua warga negara, tak terkecuali, tanpa ter- *constrained* oleh status sosial ekonomi dapat memperoleh *opportunity* yang sama dalam memperoleh pendidikan (semua jenjang) dan pelayanan kesehatan.

Agusta (2014:194) pemerintah bisa melakukan intervensi melalui pengembangan lembaga pemerintahan dan swasta. Tujuan khusus yang hendak dicapai ialah peningkatan suplai dan biaya lembaga pemerintahan, serta menyetarakan suplai proyek pembangunan dengan pelayanan yang dihasilkannya. Proyek yang dikembangkan berupa penyesuaian anggaran pemerintah, pembangunan infrastruktur ekonomi dan bangunan fisik lainnya.

2.1.5 Investasi

Investasi merupakan kegiatan penanaman modal yang dilakukan pemerintah ataupun swasta yang ditujukan untuk menciptakan produk barang ataupun jasa baru yang nantinya mampu menciptakan lapangan pekerjaan sehingga berdampak pada pengurangan pengangguran. Dengan adanya investasi baru yang bermunculan maka lambat laun juga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dimasa yang akan datang. Karena pada fase awal pembangunan, investasi harus dilakukan dibidang-bidang yang meningkatkan ekonomi eksternal yaitu mengarah pada penciptaan *overhead* sosial dan ekonomi seperti tenaga kerja, transportasi, pendidikan, kesehatan sebagainya (Jhingan, 2003:431). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 mengenai penanaman modal dijelaskan pada pasal 1 mengenai penanaman modal dalam negeri, dan pasal 3 mengenai penanaman modal asing. Nurkse menjelaskan bahwa adanya lingkaran setan kemiskinan dapat diakhiri dengan cara pembentukan modal, karena akan memicu perluasan pasar yang akan berpengaruh

pada sisi permintaan dan penawaran. Dalam pendapat neoklasik bahwa liberalisasi (pembukaan) pasar-pasar nasional akan merangsang investasi, baik itu investasi domestik, maupun luar negeri, sehingga dengan sendirinya akan memacu tingkat akumulasi modal (Todaro dan Smith, 2006:150).

Modal asing sangat membantu dalam kaitannya proses pembangunan ekonomi terutama negara terbelakang. Dengan menjalankan investasi luar negeri akan membantu proses industrialisasi lebih cepat, peningkatan modal dan dalam menciptakan kesempatan kerja lebih luas dan membantu memodernisasi sektor swasta ataupun negara. Jenis investasi asing dibagi dalam beberapa bentuk yaitu investasi langsung dimana pihak asing melakukan pengawasan secara *de fac to* atas modal yang ditanam di dalam negeri misalnya seperti pembentukan perusahaan cabang perusahaan, dll. Investasi tak langsung dimana lebih ke investasi porofolio yang sebagian besar terdiri dari penguasaan saham yang dapat dipindahkan dimana saham ini dikeluarkan atau dijamin oleh pemerintah domestik. Pada tahun-tahun terakhir ini telah muncul investasi multilateral dimana warga negara dari suatu negara membeli surat-surat obligasi *International Bank of Reconstruction and Development* (IBRD) yang membiayai suatu proyek khusus di beberapa negara terbelakang (Jhingan, 2003:483). Sedangkan penanaman modal dalam negeri merupakan investasi yang dilakukan oleh pengusaha atau pemerintah dalam negeri itu sendiri. Dapat disimpulkan bahwa adanya investasi baik asing ataupun domestik dapat mempercepat proses pembangunan ekonomi secara berkelanjutan. Namun jika investasi dalam suatu negara kurang memadai dalam kata lain masih relatif rendah maka juga akan memperlambat proses pembangunan itu sendiri.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Dalam kaitannya bahwa transformasi struktural adalah proses perubahan stuktur perekonomian dari sektor pertanian ke sektor modern. Namun disamping itu dalam setiap pembangunan wilayah tak luput dengan kasus ketidakseimbangan pembangunan. Beberapa penenelitian sebelumnya telah membahas mengenai ketimpangan pembangunan wilayah, diantaranya penelitian (Laswinia dan

Chamid, 2016) mengenai pola hubungan persentase penduduk miskin di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola hubungan kemiskinan dengan beberapa variabel di masing-masing provinsi di Indonesia dengan mengikutsertakan unsur spasial untuk mengidentifikasi wilayah tetangga memungkinkan adanya keterkaitan dengan wilayah studi. Dimana terjadi hubungan antar lokasi letak geografis semakin ketimur persentase penduduk miskin semakin tinggi, IPM, laju pertumbuhan ekonomi berkorelasi negatif, indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH), pengangguran, dan kepadatan penduduk berkorelasi positif.

Hasil studi (Hasna, 2013) mengenai pengaruh dana perimbangan terhadap ketimpangan pendapatan di Jawa Timur tahun 2008-2013. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat ketimpangan yang terjadi selama periode tersebut dengan mengaitkan unsur spasial antar daerah, serta mengidentifikasi seberapa besar variabel penelitian berpengaruh terhadap tingkat kesenjangan. Hasilnya ialah bahwa interaksi antar kabupaten satu dengan kabupaten tetangga (aspek spasial) cukup tinggi yaitu sebesar 0,47 dari rentang 0 hingga 1. Adanya dampak spasial ini berpengaruh terhadap kenaikan ketimpangan pendapatan pada seluruh kabupaten /kota kecuali Kabupaten Lamongan. Sedangkan dana perimbangan, tenaga kerja medis, dan upah minimum regional (UMR) berpengaruh positif, tenaga kerja industri berpengaruh negatif.

Ginting (2015) meneliti tentang pengaruh ketimpangan pembangunan terhadap kemiskinan di Indonesia 2004-2013, menjelaskan bahwa adanya penurunan kemiskinan di Indonesia baik di wilayah bagian barat ataupun timur selama periode tersebut, namun dengan adanya penurunan angka kemiskinan tersebut tidak serta merta terjadi perubahan yang seimbang di wilayah barat dan timur. Tetap saja persentase penduduk miskin masih banyak terdapat di Indonesia bagian timur. Sedangkan variabel ketimpangan pembangunan dan aglomerasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengurangan kemiskinan, investasi dan PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengurangan kemiskinan.

Hasil penelitian Dhyatmika dan Atmanti (2013) mengenai ketimpangan pembangunan di Provinsi Banten tahun 2001-2011 dengan menggunakan variabel

pengeluaran pemerintah, pengangguran, dan PMA. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis besarnya tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi pasca pemekaran. Dengan hasil bahwa ketimpangan pembangunan di Banten selama periode studi cenderung meningkat. Dimana variabel PMA berpengaruh positif terhadap ketimpangan pembangunan sebagai akibat tidak meratanya PMA antar daerah. Pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dimana kenaikan pengeluaran pemerintah dapat mengurangi ketimpangan, sedangkan tingkat pengangguran tidak memiliki pengaruh dikarenakan tingkat penangguran di Banten jumlahnya relatif kecil.

Setiawati dan Setiawan (2013) mengenai pemodelan persentase penduduk miskin di Jawa Timur dengan pendekatan regresi panel spasial dimana dalam penelitian ini menggunakan variabel persentase penduduk miskin sebagai variabel dependen, sedangkan variabel independen terdiri dari angka buta huruf usia 10 tahun keatas, tingkat pendidikan kurang dari SMU, tingkat pendapatan, laju pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka (TPT), tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), alokasi belanja daerah untuk kesehatan (APBD), alokasi bantuan langsung masyarakat (BLM). Dapat dijelaskan bahwa model terbaik adalah SEM *fixed effect* dimana seluruh variabel mempengaruhi persentase penduduk miskin, dan besarnya interaksi eror persentase penduduk miskin antar kabupaten/kota sebesar 0,391980, pengangguran terbuka lebih elastis dibanding variabel lainnya.

Nurhuda *et al.* (2013) tentang analisis ketimpangan pembangunan di wilayah Jawa Timur tahun 2005-2011 dengan menggunakan variabel PDRB, DAU, PAD dan IPM melalui metode regresi panel bahwa ketimpangan dengan menggunakan Indeks Williamson mengalami penurunan selama periode tersebut. PAD, IPM berpengaruh negatif dimana dengan naiknya kedua variabel akan menurunkan tingkat ketimpangan yang ada. Sedangkan untuk variabel DAU dan PDRB tidak diketahui dikarenakan tidak memenuhi syarat dalam asumsi klasik.

Dalam penelitian (Rosidah, 2016) mengenai analisis spasial dampak dana perimbangan terhadap ketimpangan di Jawa Timur tahun 2010-2014 menghasilkan bahwa ketimpangan di Jawa Timur masih tinggi dan adanya

interaksi spasial antar satu kabupaten/kota tetangga yang cukup tinggi yaitu sebesar 0,7130 dari rentang nol hingga 1. Sedangkan faktor dan perimbangan berpengaruh secara positif dan signifikan hal ini berarti bahwa jika ada peningkatan pada dana perimbangan maka akan meningkatkan pula tingkat ketimpangan di wilayah tersebut.



Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Sebelumnya

No	Nama Peneliti	Judul	Metode	Variabel	Hasil
1.	Shantong Li dan Zhaoyuan Xu (2008)	<i>The Trend of Regional Income Disparity in the People's Republic of China</i>	Panel Regression	<i>Per capita GDP, per capita consumption (household consumption), household income</i>	Tren ekspansif antar-provinsi disparitas telah melambat dan mulai menurun sejak tahun 2000. GDP per kapita dan konsumsi rumah tangga per kapita harga berlaku, menunjukkan bahwa kesenjangan antar daerah telah mengalami penurunan. perubahan kesenjangan antar daerah dalam beberapa tahun terakhir dapat dikaitkan banyak faktor, termasuk kebijakan dan faktor-faktor tertentu daerah serta beberapa siklus faktor.
2.	Andreas Bergh dan Therese Nilsson (2010)	<i>Do liberalization and globalization increase income inequality?</i>	Regresi panel fixed effect OLS dan GMM	Indeks Gini, GDP Per Kapita, Human Capital, Dependency Ratio	Estimasi GMM menunjukkan bahwa kenaikan rasio ketergantungan memiliki dampak langsung pada ketimpangan, efek ketimpangan dari kebebasan ekonomi muncul dalam negara yang relatif kaya, sementara efek globalisasi sosial berasal dari negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah.
3.	Ketut Wahyu Dhyatmika dan Hastarini Dwi Atmanti (2013)	Analisis ketimpangan pembangunan provinsi banten pasca pemekaran	Indeks Williamson, Regresi Panel (Fixed Effect), Tipologi Klassen	Penerimaan Modal Asing (PMA), Pengeluaran Pemerintah, Tingkat Pengangguran	Ketimpangan pembangunan cenderung meningkat. Dimana PMA berpengaruh positif, pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif, dan pengangguran tidak berpengaruh.
4.	Rama Nur Huda, M. R. Khairul Muluk,	Analisis ketimpangan pembangunan (studi	Indeks williamson, Regresi	PDRB, PAD, DAU, IPM	PAD, IPM berpengaruh negatif dimana dengan naikknya kedua variabel akan menurunkan tingkat ketimpangann yang ada. Sedangkan untuk variabel

No	Nama Peneliti	Judul	Metode	Variabel	Hasil
	Wima Yudo Prasetyo (2013)	kasus di provinsi Jawa Timur tahun 2005-2011)	Berganda		DAU dan PDRB tidak diketahui dikarenakan tidak memenuhi syarat dalam asumsi klasik.
5.	Setiawati Alifita Kurnia dan Setiawan (2013)	Pemodelan persentase penduduk miskin di jawa timur dengan pendekatan ekonometrika panel spasial	Ekonometrika panel spasial	angka buta huruf, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, laju pertumbuhan ekonomi, pengangguran terbuka (TPT), partisipasi angkatan kerja (TPAK), alokasi belanja daerah, alokasi bantuan langsung masyarakat (BLM)	Model terbaik adalah SEM <i>fixed effect</i> dimana seluruh variabel mempengaruhi persentase penduduk miskin, dan besarnya interaksi eror persentase penduduk miskin antar kabupaten/kota sebesar 0,391980, pengangguran terbuka lebih elastis dibanding variabel lainnya.
6.	Sofwatun Hasna (2013)	Analisis spasial pengaruh dana perimbangan terhadap ketimpangan pendapatan di provinsi jawa timur tahun 2008-2011	Indeks williamson dan spasial ekonometri	Ketimpangan pendapatan, dana perimbangan, tenaga medis, UMR, tenaga kerja industri, tenaga kerja terdidik	IW menunjukkan ketimpangan pendapatan tinggi dan cenderung konstan, hasil regresi spasial sebesar 0,471 menunjukkan ketimpangan tinggi.

No	Nama Peneliti	Judul	Metode	Variabel	Hasil
7.	Ari Muliando Ginting (2015)	Pengaruh ketimpangan pembangunan antar wilayah terhadap kemiskinan di indonesia 2004-2013	Indeks Williamson, Regresi Panel	Kemiskinan, Ketimpangan Pembangunan, Aglomerasi, PDRB, Investasi	Terjadi penurunan ketimpangan pembangunan di indonesia barat ataupun timur. Ketimpangan pembangunan dan aglomerasi positif dan signifikan, pdrb dan investasi berpengaruh negatif dan signifikan
8.	Dustin Chambers dan Shatakshee Dhongde (2016)	<i>Convergence in income distributions: Evidence from a panel of countries</i>	Panel OLS GMM	Indeks Gini Data Base, Gni Percapita, Pendapatan Bersih Rumah Tangga, GDP Per capita	Distribusi pendapatan di negara-negara menjadi semakin tidak sama namun lebih mirip satu sama lain. Akibatnya, negara-negara mulai mengkoordinasikan strategi untuk bersama-sama mengurangi ketimpangan melalui inisiatif seperti Tujuan PBB Pembangunan Berkelanjutan.
9.	Elly Rosidah (2016)	Analisis Spasial Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Jawa Timur Tahun 2010 – 2014	Regresi panel Spasial	Ketimpangan Pendapatan, Dana Perimbangan	ketimpangan di jawa timur masih tinggi dan adanya interaksi spasial antar satu kabupaten/kota tetangga yang cukup tinggi yaitu sebesar 0,7130, sedangkan faktor dan perimbangan berpengaruh secara positif dan signifikan.
10.	Vonesa Devi Laswinia dan	Analisis Pola Hubungan Persentase	Regresi spasial (SAR, SEM,	Persentas Penduduk Miskin, Indeks	Dihasilkan model terbaik yaitu SAR dengan R ² sebesar 64,6% tertinggi dimana terjadi hubungan

No	Nama Peneliti	Judul	Metode	Variabel	Hasil
	Mutiah Salamah Chamid (2016)	Penduduk Miskn Dengan Faktor Lingkungan, Ekonomi, Dan Sosial Di Indonesia Menggunakan Regresi Spasial	SDM)	Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), IPM, Laju Pertumbuhan PDRB, Kepadatan Penduduk, Tingkat Pengangguran Terbuka	antar lokasi letak geografis semakin ketimur persentase penduduk miskin smekain tinggi, IPM, laju pertumbuhan ekonomi berkorelasi negatif, IKLH, pengangguran, dan kepadatan penduduk berkorelasi positif.

Sumber: Berbagai jurnal diolah

2.3 Kerangka Konseptual

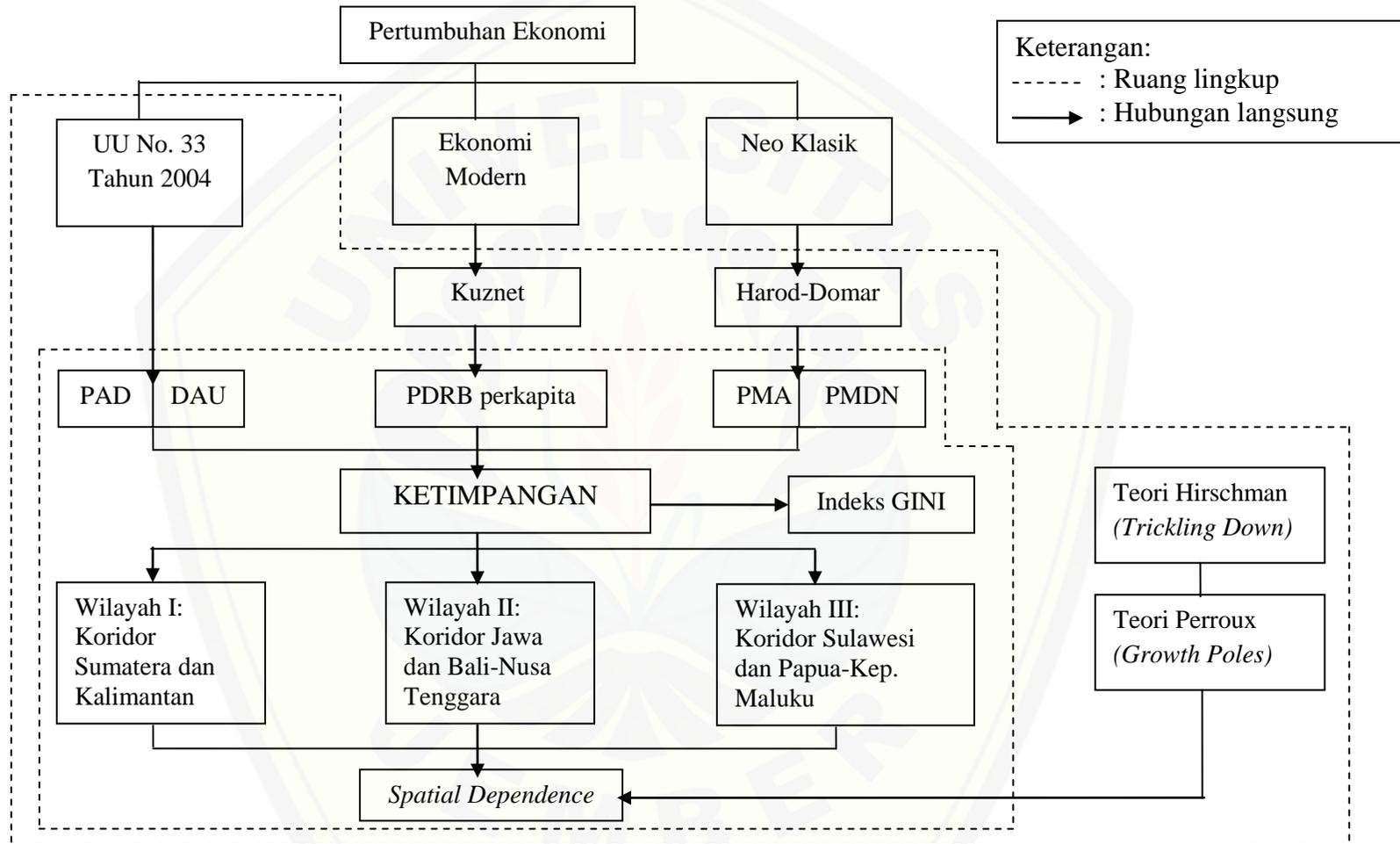
Kerangka konseptual merupakan suatu uraian pemikiran secara ringkas agar lebih mudah dalam memahami makna dan tujuan dalam penelitian yang diinginkan. Dengan demikian, uraian atau paparan yang harus dilakukan dalam kerangka berfikir adalah perpaduan antara asumsi-asumsi teoritis dan asumsi-asumsi logika dalam menjelaskan atau memunculkan variabel-variabel yang diteliti serta bagaimana kaitan diantara variabel-variabel tersebut, ketika dihadapkan pada kepentingan untuk mengungkapkan fenomena atau masalah yang diteliti (Hamdi dan Bahrudin, 2014:33).

Dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah selalu dikaitkan dengan masalah-masalah makroekonomi, seperti halnya masalah kesenjangan antar wilayah. Banyak faktor yang mempengaruhi tingkat ketimpangan suatu wilayah mulai dari ekonomi, sosial, politik, dll. Dalam penelitian ini membahas mengenai ketimpangan wilayah yang terjadi antar provinsi di Indonesia selama periode 2011-2015 dengan variabel penelitian indeks gini, PAD, DAU, PMA, PMDN, dan PDRB perkapita menggunakan pendekatan spasial ekonometri dimana model ini akan menjelaskan mengenai bagaimana pengaruh variabel tersebut dengan mempertimbangkan seberapa besar dampak spasial yang terjadi antar wilayah satu dengan wilayah tetangga. Dimana teori yang digunakan ialah mengenai teori pertumbuhan ekonomi Neoklasik yaitu Harod-Domar yang lebih menekankan investasi dalam pertumbuhan ekonomi dimana jika tingkat investasi rendah maka pertumbuhan akan rendah. Jika investasi hanya terjadi di beberapa daerah sentral saja maka hal ini akan menyebabkan ketidakmerataan pembangunan, seperti halnya teori yang dikemukakan oleh Myrdal dimana pembangunan mempunyai dampak balik dan dampak sebar bagi wilayah sekitarnya terutama wilayah yang terbelakang.

Salah satu kriteria keterbelakangan yang paling umum diterima ialah rendahnya pendapatan perkapita negara terbelakang dibanding negara-negara maju (Jhingan, 2003:12). Sedangkan Kuznet menjelaskan bahwa semakin tinggi PDRB/PDRB perkapita dalam jangka pendek akan meningkatkan tingkat kesenjangan dikarenakan masyarakat masih belum terbiasa dengan kondisi

dimana di kaya akan semakin kaya dan si miskin akan tetap tertinggal, sedangkan dalam jangka panjang tingkat kesenjangan akan semakin menurun seiring dengan meningkatnya pendapatan seperti yang diterangkan dalam kurva U terbalik. Dalam konteks keuangan daerah dimana mencerminkan bahwa alokasi dana pemerintah sangat penting untuk keberlangsungan pembangunan ekonomi secara berkelanjutan. Besar kecilnya dana pemerintah yang disalurkan telah diatur dalam APBD, yaitu tertuang dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 mengenai perimbangan keuangan pusat ke daerah yang bertujuan untuk menndanai dan memfasilitasi wilayah-wilayah dalam segi keuangan secara adil yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan wilayah itu sendiri. Dengan adanya Undang-Undang ini diharapkan mampu menciptakan tujuan dari otonomi daerah yaitu membentuk wilayah yang mandiri dan sejahtera. Dalam hal ini menuju ke permasalahan utama yaitu kaitannya dengan aspek spasial wilayah.

Aspek spasial merupakan hubungan keterkaitan antar daerah satu dengan daerah tetangga lainnya yang berdekatan. Hukum geografis Tobler menjelaskan bahwa “setiap hal memiliki keterkaitan dengan hal lainnya, namun yang lebih dekat akan memiliki keterkaitan yang lebih dari lainnya”. Berdasarkan teori spasial yang dikemukakan oleh Hirschman bahwa proses pembangunan yang nantinya akan berdampak positif atau menyebar ke wilayah tetangga (*trickling down*), namun sebaliknya jika lemah maka akan mengakibatkan polarisasi pertumbuhan dimana wilayah kota yang semakin maju sedangkan wilayah pedesaan yang terbelakang. Sedangkan menurut Perroux Dalam teorinya (*growth poles*) kutub pertumbuhan tidak hanya sebagai industri pendorong, namun juga pertumbuhan yang terjadi diharapkan mampu mempengaruhi wilayah lain disekitarnya, sehingga diperlukan interaksi antara kutub-kutub pertumbuhan dengan wilayah yang terpengaruh. Dengan mempertimbangkan aspek spasial dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran apakah kondisi ketimpangan di Indonesia saling berkaitan antar wilayah satu dengan wilayah lain yang berdekatan. Dengan demikian dapat digambarkan kerangka konseptual untuk mempermudah menjelaskan alur dan tujuan dalam penelitian ini.



Gambar 2.2 Kerangka Konseptual

2.4 Keaslian Penelitian

Pada subbab 2.4 ini akan dijelaskan mengenai keaslian penelitian ini, dimana didalamnya meliputi perbedaan dan persamaan dengan penelitian sebelumnya, yaitu sebagai berikut:

1. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini berkaitan dengan aspek spasial antar wilayah koridor di Indonesia berdasarkan kebijakan MP3EI 2011, yang kemudian dibagi menjadi tiga wilayah berdasarkan kemiripan potensi masing-masing koridor. Sedangkan dalam penelitian sebelumnya lebih mengkaji pada lingkup per Provinsi ataupun langsung secara keseluruhan se-Indonesia.
2. Tahun analisis data dimulai dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, yang kemudian data dari masing-masing variabel dirata-rata. Yang kemudian dalam prosesnya, menggunakan bantuan *software geoda*. Sedangkan dalam penelitian sebelumnya tidak menggunakan geoda
3. Dalam penelitian ini menambahkan variabel PMDN, dimana dalam penelitian sebelumnya variabel PMDN tidak dimasukkan.
4. Sedangkan persamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama memasukkan unsur spasial, beberapa variabel merupakan perpaduan dari penelitian sebelumnya terkecuali variabel PMDN, beberapa teori yang digunakan juga merupakan variasi dari penelitian sebelumnya.

2.5 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban atau kesimpulan sementara yang harus diuji sesuai dengan data yang dikumpulkan. Berdasarkan landasan teori dan penelitian sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. Adanya hubungan saling keterkaitan spasial disparitas wilayah studi dengan wilayah tetangga antar Provinsi di Indonesia.
2. PAD berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat disparitas antar Provinsi di Indonesia.
3. DAU berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat disparitas antar Provinsi di Indonesia.

4. PDRB perkapita berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat disparitas antar Provinsi di Indonesia.
5. PMA berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat disparitas antar Provinsi di Indonesia.
6. PMDN berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat ketimpangan antar Provinsi di Indonesia

2.6 Limitasi Penelitian

Limitasi penelitian disini merupakan suatu pemaparan mengenai obyek apa yang dibahas dalam ruang lingkup penelitian agar tidak meluas ke bidang lainnya. Penelitian ini hanya menjelaskan mengenai aspek spasial terhadap ketimpangan wilayah yang terjadi antar Provinsi di Indonesia tahun 2011 s.d 2015 dengan variabel yang digunakan meliputi PAD, DAU, PMA, PMDN, dan PDRB perkapita, dan berdasarkan kerangkateoriyang telah ditetapkan.

BAB 3. METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai metode analisis data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah diatas beserta menjelaskan masing-masing defnisi operasional variabel yang digunakan.

3.1 Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian adalah suatu tahap dalam penelitian dimana didalamnya meliputi beberapa beberapa unsur yang menjelaskan alur metode penelitian yang hendak dilakukan.

3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif eksplanatori. Dimana secara deskriptis menjelaskan mengenai suatu masalah kejadian secara fakta ataupun realita. Sedangkan eksplanatori menerangkan suatu kejadian sebab akibat atau hubungan antar variabel. Dimana suatu kasus memiliki keunikan dan kemudian dicocokkan dengan teori-teori yang sesuai atau mengumpulkan jurnal sejenis. Selanjutnya dalam penelitian ekspalantori ini data yang diperoleh dikumpulkan melalui berbagai macam sumber entah lewat observasi masyarakat atau mempelajari dokumen-dokumen tertulis (Semiawan, 2010:51). Sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder atau secara umum disebut data kuantitatif. Dimana data sekunder merupakan data yang didapat dari instansi-insatansi terkait yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Dajan (1986:17) data kuantitatif merupakan serangkaian observasi atau pengukuran yang dinyatakan dalam angka-angka. Alasan menggunakan periode 2011 s.d 2015 adalah sebagai berikut:

1. Tahun 2011 kondisi perekonomian global penuh ketidakpastian yang memicu dampak negatif pada resiko perekonomian dimasa mendatang, namun untuk indonesia sendiri mengalami pertumbuhan tinggi yaitu sekitar 6,5%
2. Sejak tahun 2011 penurunan kemiskinan melambat, secara absolut menurun kurang dari 1 juta penduduk miskin per tahun. Hal ini ditunjukkan oleh kondisi kemiskinan yang kronis dan kondisi makroekonomi yang belum optimal.

3. Setelah diberlakukannya MP3EI oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 20 Mei 2011.

Mengenai data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didapat dari instansi pemerintah seperti BPS dan instansi lainnya yang terkait. Variabel penelitian meliputi indeks gini, PDRB perkapita, PAD, DAU, PMA, dan PMDN.

3.1.2 Waktu dan Tempat Penelitian

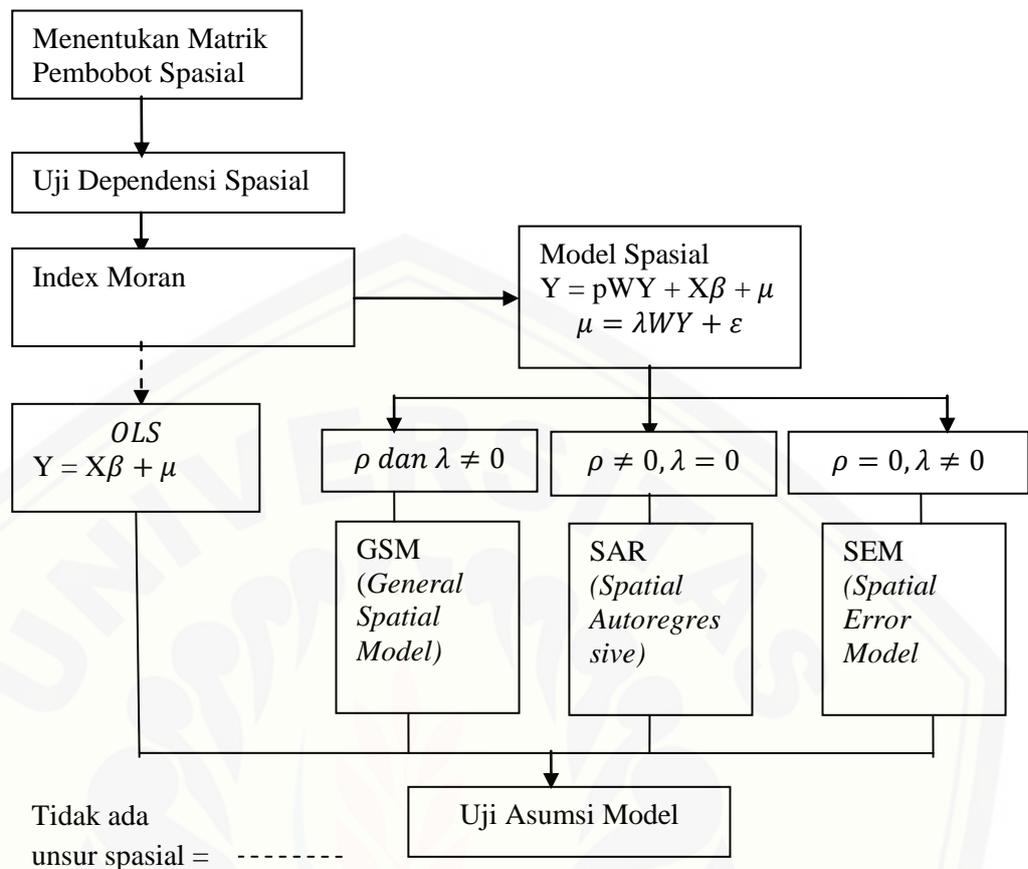
Waktu penelitian disini berkisar mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 dengan merata-rata data panel menjadi satu dan menggunakan 34 provinsi sebagai *cross section* dan masing-masing dibagi menjadi 3 bagian berdasarkan enam wilayah koidor provinsi yaitu wilayah I meliputi Koridor Sumatera dan Kalimantan (15 provinsi), Wilayah II meliputi Koridor Jawa dan Bali-Nusa Tenggara (9 provinsi), wilayah III meliputi Koridor Sulawesi dan Papua-Kep. Maluku (10 provinsi). Alasan memilih Indonesia sebagai studi kasus, karena tingkat ketimpangan pendapatan di Indonesia masih tinggi. Dapat dilihat dari beberapa penelitian sebelumnya bahwa adanya perbedaan yang signifikan antara pembangunan Indonesia bagian barat dan bagian timur.

3.2 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data *cross section* dengan cara merata-rata data disetiap observasi yaitu dari tahun 2011 sampai dengan 2015. Untuk melihat seberapa besar keterkaitan antar daerah satu dengan daerah lainnya yang berdekatan dalam kurun waktu lima tahun tersebut dengan menggunakan *software* Geoda.

3.2.1 Prosedur Pengujian Model Spasial

Dalam menentukan ada tidaknya aspek spasial dalam model maka akan dilakukan beberapa langkah-langkah untuk mempermudah dalam proses pengujian. Berikut tersaji dalam bagan dibawah ini:



Gambar 3.1 Prosedur Pengujian Model
Sumber: Model Estimasi Permintaan

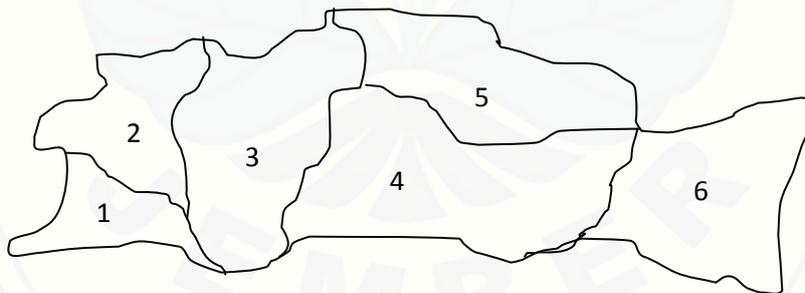
3.2.2 Matrik Pembobot Spasial

Matrik pembobot spasial (W) merupakan satuan yang diperoleh dari jarak antar region satu dengan region lainnya yang berdekatan. Menurut LeSage (1999) untuk menentukan matrik pembobot spasial dapat digunakan berapa metode yaitu:

1. *Rook Contiguity* (persinggungan sisi), dimana bobot antar wilayah (w_{ij}) = 1 untuk wilayah yang bersisian (*common side*) dengan wilayah yang menjadi titik perhatian dan $w_{ij} = 0$ untuk wilayah lain yang tidak bersisian.
2. *Linear Contiguity* (persinggungan tepi) dimana $w_{ij} = 1$ untuk wilayah yang bersinggungan ditepi kiri dan kanan wilayah yang menjadi titik perhatian dan $w_{ij} = 0$ wilayah lainnya yang tidak bersinggungan di tepi kiri dan kanannya.

3. *Queen Contiguity* (persinggungan sisi sudut) dimana $w_{ij} = 1$ wilayah yang bersisian atau titik sudutnya bertemu dengan wilayah yang menjadi titik perhatian dan $w_{ij} = 0$
4. *Bhisop Contiguity* (persinggungan sudut) dimana $w_{ij} = 1$ untuk wilayah yang titik sudutnya bertemu dengan wilayah pusat perhatian dan $w_{ij} = 0$ untuk wilayah lain yang titik sudutnya tidak bertemu.
5. *Double Linear Contiguity* (persinggungan dua tepi) dimana $w_{ij} = 1$ untuk dua *entity* yang berada disisi (*edge*) kiri dan kanan wilayah perhatian dan $w_{ij} = 0$ untuk wilayah lainnya.
6. *Double Rook Contiguity* (persinggungan dua sisi) dimana $w_{ij} = 1$ untuk entity kiri, kanan, utara, dan selatan dari wilayah yang menjadi perhatian sedangkan $w_{ij} = 0$ untuk wilayah lainnya.

Dalam penelitian ini untuk menentukan matrik pembobot spasial akan menggunakan metode *Rook Contiguity* (persinggungan sisi). Metode *Rook Contiguity* mendefinisikan bahwa lokasi yang bersisian bertemu dengan lokasi yang menjadi perhatian diberi pembobotan $w_{ij} = 1$, sedangkan untuk lokasi lainnya adalah $w_{ij} = 0$ (LeSage, 1999).



Gambar 3.2 Ilustrasi Peta Menentukan Matrik Pembobot Spasial

Dari gambar diatas maka diperoleh matrik sebagai berikut:

	1	2	3	4	5	6
1	0	1	1	0	0	0
2	1	0	1	0	0	0
3	1	1	0	1	1	0
4	0	0	1	0	1	1
5	0	0	1	1	0	1
6	0	0	0	1	1	0

Jumlah = 2 2 4 3 3 2

Baris dan kolom pada matrik diatas menunjukkan suatu wilayah dalam penentuan matrik pembobot spasial berdasarkan metode *Rook Contiguity*, sehingga diperoleh:

W =

0/2	1/2	1/4	0/3	0/3	0/2
1/2	0/2	1/4	0/3	0/3	0/2
1/2	1/2	0/4	1/3	1/3	0/2
0/2	0/2	1/4	0/3	1/3	1/2
0/2	0/2	1/4	1/3	0/3	1/2
0/2	0/2	0/4	1/3	1/3	0/2

Maka W =

0	0,5	0,25	0	0	0	0,75
0,5	0	0,25	0	0	0	0,75
0,5	0,5	0	0,33	0,33	0	1,66
0	0	0,25	0	0,33	0,5	1,08
0	0	0,25	0,33	0	0,5	1,08
0	0	0	0,33	0,33	0	0,66

Dari matrik terakhir diatas yang digunakan atau dimasukkan dalam variabel X adalah nilai akhir yang berada di samping matrik yaitu 0,75; 0,75; 1,66; 1,08; 1,08; 0,66. Karena Indonesia terdapat beberapa provinsi yang tidak memiliki tetangga secara berhimpitan yaitu Kepulauan Bangka Belitung; Kepulauan Riau; Bali, Nusa Tenggara Barat; Nusa Tenggara Timur; Maluku Utara; dan Maluku. Namun dalam pembuatan pembobot ini telah dapat dilakukan dengan menggunakan *software Geoda*.

3.2.3 Model Spasial Lag dan Model Spasial Error

(Rahayu dan Romzi, 2012) model spasial lag atau sering disebut juga sebagai model *spatial autoregressive* (SAR) tersusun atas variabel spasial lag dependen (WY) yang berperan sebagai variabel independen. Model ini menunjukkan adanya pengaruh variabel independen pada ruang j terhadap variabel dependen pada ruang i (Hasna, 2013). Sedangkan model spasial error (SEM) digunakan untuk menggambarkan keterkaitan spasial yang terjadi pada error randomnya, model ini tersusun atas spasial error (W^ϵ sebagai variabel independennya).

$$\text{Model spatial lag : } Y_{it} = \partial \sum_{j=1}^N W_{ij} Y_{jt} + X_{it} \beta + \mu_i + \epsilon_{it} \dots\dots\dots (3.1)$$

Dimana ∂ adalah koefisien *spatial autoregressive* dan W adalah koefisien matrik pembobot spasial yang menjelaskan penataan ruang dari unit dalam sampel (J. Paul Elhorst).

$$\text{Model spatial error : } Y_{it} = X_{it} \beta + \mu_i + \phi_{it} \dots\dots\dots (3.2)$$

$$\phi_{it} = \rho \sum_{j=1}^N W_{ij} \phi_{jt} + \epsilon_{it}$$

Dimana ϕ mencerminkan istilah *error spasial autocorrelated* dan ρ disebut koefisien autokorelasi spasial (J. Paul Elhorst).

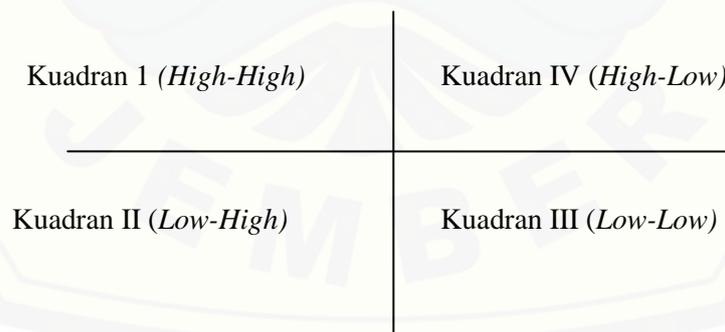
3.2.4 Indeks Moran

Sebelum melakukan regresi pada model maka tahap awal yang digunakan ialah menghitung indeks moran dimana tujuannya ialah untuk mengetahui ada

tidaknya keterkaitan spasial pada variabel Y, yang sebelumnya perlu diketahui nilai matrik pembobot spasial (W) dimana wilayah yang memiliki tetangga banyak maka nilai W akan semakin kecil, sebaliknya wilayah yang memiliki tetangga sedikit maka nilai W semakin besar.

$$I = \frac{n \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n w_{ij} (x_i - \bar{x})(x_j - \bar{x})}{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n w_{ij} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

\bar{x} merupakan rata-rata observasi, w_{ij} adalah bobot keterkaitan antara wilayah i dan j . *Moran's test* dilakukan untuk melihat ada tidaknya indikasi *spasial autocorrelation*. Nilai indeks Moran's I berada pada rentang $-1 < I < 1$. Jika I positif signifikan maka akan terjadi pengelompokan wilayah yang memiliki karakteristik sama (daerah rasio indeks gini tinggi dikelilingi oleh daerah tetangga yang rasio indeks ginya tinggi pula, dan sebaliknya. Jika $I > 0$ maka nilai autokorelasi positif dan pola data berkelompok (*cluster*). Jika $I = 0$ maka tidak terdapat autokorelasi spasial, jika $I < 0$ maka autokorelasi bernilai negatif yang artinya pola data berpecah (*disperse*). Untuk melihat grafik persebaran pengaruh spasial Indeks Moran dapat dilihat pada *Moran Scatterplot*, dimana dibagi dalam empat kuadran yaitu:



Gambar 3.3 *Moran Scatterplot*

Klasifikasi kuadran menurut Zhukov yaitu:

1. Kuadran I (*High-High*) menunjukkan bahwa wilayah yang mempunyai amatan (misalnya dalam penelitian ini indeks gini) tinggi akan dikelilingi oleh wilayah yang mempunyai nilai amatan (indeks gini) tinggi pula.
2. Kuadran II (*Low-High*) daerah yang mempunyai nilai amatan rendah akan dikelilingi oleh daerah yang mempunyai nilai amatan tinggi.
3. Kuadran III (*Low-Low*) daerah yang mempunyai nilai amatan rendah akan dikelilingi oleh daerah yang mempunyai nilai amatan rendah
4. Kuadran IV (*High-Low*) daerah yang mempunyai nilai amatan tinggi akan dikelilingi oleh daerah yang mempunyai amatan rendah

Alternatif selanjutnya untuk pengambilan keputusan keputusan ada tidaknya autokorelasi spasial antar lokasi yang menggunakan Indeks Moran adalah -1 dan 1, jika $I > I_0$ maka data memiliki autokorelasi positif. Jika $I < I_0$ maka data memiliki autokorelasi negatif.

$$E(I) = I_0 = -\frac{1}{n-1}$$

Dimana $E(I)$ merupakan *expected value Moran's I*

3.2.5 Model Penelitian

Dalam model penelitian ini mengadopsi dari model yang pernah dilakukan oleh (Hasnah, 2013) mengenai analisis spasial pengaruh dana perimbangan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Timur tahun 2008-2011, dengan model sebagai berikut:

1. Spasial *Lag* (SAR)

$$rgini_{it} = \rho W rgini_{jt} + \beta_1 \text{dana perimbangan}_{it} + \beta_2 TKindustri_{it} + \beta_3 TKterdidik_{it} + \beta_4 Medis_{it} + \beta_5 UMR_{it} + \mu_{it} + \varepsilon_{it} \dots\dots\dots (3.3)$$

2. Spasial *Error* (SEM)

$$rgini_{it} = \beta_1 \text{dana perimbangan}_{it} + \beta_2 TKindustri_{it} + \beta_3 TKterdidik_{it} + \beta_4 Medis_{it} + \beta_5 UMR_{it} + \Phi_{it} \dots\dots\dots (3.4)$$

$$\phi_{it} = \rho \sum_{j=1}^N W_{ij}\phi_{it} + \varepsilon_{it}$$

Dari model diatas maka dapat diperoleh model modifikasi sebagai berikut:

1. Spasial Lag (SAR)

$$rgini_{it} = \partial W rgini_{jt} + \beta_1 PAD_{it} + \beta_2 PDRB PERKAPITA_{it} + \beta_3 DAU_{it} + \beta_4 PMDN_{it} + \beta_5 PMA_{it} + \mu_{it} + \varepsilon_{it} \dots\dots\dots (3.5)$$

Wilayah I

$$rgini_{it} = \partial W rgini_{jt} + \beta_1 PAD_{it} + \beta_2 PDRB PERKAPITA_{it} + \beta_3 DAU_{it} + \beta_4 PMDN_{it} + \beta_5 PMA_{it} + \mu_{it} + \varepsilon_{it} \dots\dots\dots (3.5.1)$$

Wilayah II

$$rgini_{it} = \partial W rgini_{jt} + \beta_1 PAD_{it} + \beta_2 PDRB PERKAPITA_{it} + \beta_3 DAU_{it} + \beta_4 PMDN_{it} + \beta_5 PMA_{it} + \mu_{it} + \varepsilon_{it} \dots\dots\dots (3.5.2)$$

Wilayah III

$$rgini_{it} = \partial W rgini_{jt} + \beta_1 PAD_{it} + \beta_2 PDRB PERKAPITA_{it} + \beta_3 DAU_{it} + \beta_4 PMDN_{it} + \beta_5 PMA_{it} + \mu_{it} + \varepsilon_{it} \dots\dots\dots (3.5.3)$$

2. Spasial Error (SEM)

$$rgini_{it} = \beta_1 PAD_{it} + \beta_2 PDRB PERKAPITA_{it} + \beta_3 DAU_{it} + \beta_4 PMDN_{it} + \beta_5 PMA_{it} + \phi_{it} \dots\dots\dots (3.6)$$

$$\phi_{it} = \rho \sum_{j=1}^N W_{ij}\phi_{it} + \varepsilon_{it}$$

Wilayah I

$$rgini_{it} = \beta_1 PAD_{it} + \beta_2 PDRB PERKAPITA_{it} + \beta_3 DAU_{it} + \beta_4 PMDN_{it} + \beta_5 PMA_{it} + \phi_{it} \dots\dots\dots (3.6.1)$$

$$\phi_{it} = \rho \sum_{j=1}^N W_{ij}\phi_{it} + \varepsilon_{it}$$

Wilayah II

$$rgini_{it} = \beta_1 PAD_{it} + \beta_2 PDRB PERKAPITA_{it} + \beta_3 DAU_{it} + \beta_4 PMDN_{it} + \beta_5 PMA_{it} + \phi_{it} \dots\dots\dots (3.6.2)$$

$$\phi_{it} = \rho \sum_{j=1}^N Wij\phi_{it} + \epsilon_{it}$$

Wilayah III

$$rgini_{it} = \beta_1 PAD_{it} + \beta_2 PDRB PERKAPITA_{it} + \beta_3 DAU_{it} + \beta_4 PMDN_{it} + \beta_5 PMA_{it} + \phi_{it} \dots\dots\dots(3.6.3)$$

$$\phi_{it} = \rho \sum_{j=1}^N Wij\phi_{it} + \epsilon_{it}$$

3.2.6 Lagrange Multiplier

Uji *Lagrange Multiplier* ini dimana untuk menentukan model terbaik antara model SAR atau SEM. (Laswinia dan Chamid, 2016) uji *lagrange multiplier* dengan hipotesis H0 tidak ada dependensi spasial $\rho = 0$ dan H1 ada dependensi spasial $\rho \neq 0$, dimana WY $\rho = 0$ maka model SEM lebih baik digunakan dibandingkan SEM, sedangkan jika nilai koefisien WY $\rho \neq 0$ maka model SAR lah yang lebih baik digunakan.

$$LM\ lag = \frac{(\frac{e'Wy}{\sigma^2})^2}{\frac{(wx\beta)'Mwx\beta}{\sigma^2} + trace [(W' + W)W]}$$

Sedangkan untuk LM model spasial error digunakan untuk mengetahui apakah nilai koefisien $W\epsilon$ $\rho = 0$ maka model SAR lebih baik digunakan dibandingkan SEM. Namun jika nilai koefisien $W\epsilon$ $\rho \neq 0$ maka model SEM lah yang lebih baik digunakan.

$$LM\ error = \frac{(\frac{e'We}{\sigma^2})^2}{trace[(W' + W)W]}$$

kemudian apabila model yang terpilih keduanya maka diperlukan uji lanjutan yang dinamakan Uji *Lagrange Multiplier Robbust*, yaitu sama seperti uji LM seperti diatas yaitu untuk melihat apakah nilai koefisien WY dan We sama dengan nol atau tidak, hanya saja berbeda pada statistik ujinya.

3.3 Definisi Operasional Variabel

1. Ketimpangan wilayah merupakan suatu kondisi dimana pembangunan dalam suatu negara terjadi ketidakseimbangan yang disebabkan oleh berbagai faktor sosial ekonomi. Menurut ekonom neo klasik pada awalnya ketimpangan cenderung meningkat, namun dengan adanya proses pembangunan yang berkelanjutan maka secara bertahap tingkat ketimpangan akan menurun. Sesuai dengan hipotesa Kuznet bahwa tingkat ketimpangan berbentuk kurva U terbalik seperti halnya yang telah dijelaskan dibagian bab dua. Dalam indek ketimpangan ini menggunakan indeks gini dalam satuan persen per tahun.
2. Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 18. PAD ini terdiri dari penjumlahan total dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain PAD yang sah, dengan satuan rupiah (Rp) per tahun.
3. PDRB Per Kapita merupakan PDRB dari keseluruhan suatu wilayah yang dibagi dengan jumlah penduduk dalam satuan rupiah sehingga menghasilkan pendapatan per kapita dalam rupiah per tahun (BPS) (Rp).
4. Dana alokasi umum (DAU) dana alokasi umum ini merupakan bagian dari dana perimbangan, dimana dana perimbangan yang dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah pusat dan daerah dan antar pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi

khusus (DAK) yang dinyatakan dalam satuan rupiah (Rp) per tahun (Makmun, 2008:62).

5. Penanaman modal asing (PMA) dalam rupiah (Rp) per tahun, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 pasal 2 penanaman modal asing diartikan sebagai:

a. Alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia, yang dengan persetujuan pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia.

b. Alat-alat untuk perusahaan, termasuk penemuan-penemuan baru milik orang asing dan bahan-bahan, yang dimasukkan dari luar ke dalam wilayah Indonesia, selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan devisa Indonesia.

c. Bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan Undang-Undang ini diperkenankan ditransfer, tetapi dipergunakan untuk membiayai perusahaan di Indonesia.

6. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dinyatakan dalam rupiah (Rp) per tahun, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

BAB 5. PENUTUP

Dalam bab 5 ini akan dibahas mengenai kesimpulan beserta saran dari semua hasil analisis dalam penelitian ini yang meliputi semua provinsi di Indonesia, dalam bentuk tiga pembagian wilayah studi yaitu Wilayah I, Wilayah II, dan Wilayah III.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas mengenai analisis disparitas wilayah antar Provinsi di Indonesia dengan menggunakan aspek spasial tahun 2011 sampai dengan 2015 maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil analisis regresi menunjukkan model terbaik adalah *Spatial Lag* bahwa variabel aspek spasial baik di Wilayah I, Wilayah II, dan Wilayah III menunjukkan adanya interaksi spasial antar wilayah secara signifikan dengan arah negatif, dimana setiap adanya kenaikan indeks gini di wilayah studi maka akan mengurangi nilai indeks gini di wilayah tetangga. dan sebaliknya apabila terdapat kenaikan indeks gini di wilayah tetangga naik, maka akan menurunkan indeks gini di wilayah studi. Untuk perhitungan indeks moran di wilayah I menggambarkan adanya hubungan autokorelasi spasial antar wilayah tetangga, dimana persebaran data yang banyak menyebar yaitu pada kuadran III dan IV. Kuadran III dengan kategori *Low-Low* yaitu wilayah yang mempunyai nilai Indeks Gini rendah dikelilingi oleh wilayah yang mempunyai nilai Indeks Gini rendah, sedangkan untuk kuadran IV dengan kategori *High-Low* dimana daerah yang mempunyai nilai Gini tinggi maka dikelilingi oleh daerah yang mempunyai nilai Gini rendah. Wilayah II, hasil Indeks Moran juga menunjukkan adanya hubungan autokorelasi spasial dalam wilayah. Dan wilayah II termasuk kategori *High-Low* dimana daerah yang mempunyai nilai Gini tinggi maka dikelilingi oleh daerah yang mempunyai nilai Gini rendah. Dan untuk Wilayah III. Hasil Indeks Moran menggambarkan adanya autokorelasi spasial di wilayah tersebut. Dimana persebaran data yang banyak menyebar yaitu pada kuadran IV dimana dengan kategori *High-Low* dimana

daerah yang mempunyai nilai Gini tinggi maka dikelilingi oleh daerah yang mempunyai nilai Gini rendah.

2. Variabel PAD pada Wilayah I menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan. Artinya ketimpangan di Wilayah I tidak secara keseluruhan tidak dipengaruhi oleh variabel PAD melainkan ada faktor lain yang lebih berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan pendapatan pada wilayah tersebut. Sedangkan pada Wilayah II PAD berpengaruh positif signifikan. Hal ini mengindikasikan berarti setiap adanya kenaikan PAD sebesar satu satuan maka akan menurunkan nilai indeks gini di Wilayah II. Untuk Wilayah III PAD juga berpengaruh secara positif signifikan terhadap indeks ketimpangan. Hal ini berarti bahwa setiap ada kenaikan PAD sebesar satu satuan maka akan menaikkan nilai indeks gini di Wilayah III.
3. Variabel PDRB per Kapita pada Wilayah I menunjukkan hasil yang negatif signifikan. Dapat diartikan bahwa setiap ada kenaikan PDRB per kapita sebesar satu satuan maka akan menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan di Wilayah I. Pada Wilayah II menghasilkan variabel PDRB per kapita berpengaruh secara positif signifikan, dimana setiap ada kenaikan PDRB per kapita sebesar satu satuan maka akan menaikkan nilai indeks ketimpangan di Wilayah II. Untuk Wilayah III variabel PDRB per kapita tidak secara keseluruhan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat ketimpangan yang ada.
4. Variabel DAU pada Wilayah I berpengaruh negatif signifikan, dapat diartikan bahwa setiap ada kenaikan DAU sebesar satu satuan maka akan menurunkan nilai indeks ketimpangan di Wilayah II. Untuk Wilayah II variabel DAU berpengaruh secara positif signifikan, dimana setiap ada kenaikan DAU sebesar satu satuan maka akan menaikkan tingkat ketimpangan pendapatan pada Wilayah II. Sedangkan untuk Wilayah III DAU tidak secara keseluruhan tidak berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan pendapatan di Wilayah III. Hal ini dikarenakan adanya faktor lain yang lebih dominan yang berkorelasi dalam model.

5. Variabel PMDN pada Wilayah I bahwa variabel PMDN tidak secara keseluruhan tidak berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan pembangunan di Wilayah I. Pada Wilayah II PMDN berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat ketimpangan. Dimana setiap ada kenaikan PMDN sebesar satu satuan maka akan menurunkan tingkat kesenjangan pendapatan di Wilayah II. Dan untuk Wilayah III PMDN berpengaruh negatif signifikan terhadap indeks ketimpangan, yang artinya setiap ada kenaikan PMDN sebesar satu satuan maka akan menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan di Wilayah III.
6. Variabel PMA pada Wilayah I menunjukkan tidak secara keseluruhan tidak berpengaruh terhadap indeks ketimpangan. Dimana setiap ada kenaikan PMA sebesar satu satuan tidak akan menambah atau mengurangi tingkat ketimpangan pendapatan di Wilayah I. Sedangkan untuk Wilayah II PMA berpengaruh positif signifikan terhadap indeks ketimpangan pendapatan. Dimana setiap ada kenaikan PMA sebesar satu satuan, akan meningkatkan pula nilai indeks ketimpangan di Wilayah II. Untuk Wilayah III PMA tidak secara keseluruhan tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks ketimpangan pendapatan. Dimana setiap ada kenaikan PMA sebesar satu satuan tidak akan menambah atau mengurangi tingkat ketimpangan pendapatan di Wilayah III.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas dapat diambil rekomendasi kebijakan yang nantinya ditetapkan untuk pemerintah dalam mengurangi ketidakmerataan pendapatan yang terjadi diantaranya:

1. Dalam rangka pengurangan ketimpangan pendapatan, ada baiknya pemerintah lebih memerhatikan lagi kondisi daerah yang masih tertinggal, tidak hanya terfokus pada daerah yang sudah maju. Untuk kebijakan dana pembangunan antar pusat ke daerah, perlu diperhatikan kapasitas fiskal setiap daerah agar dana yang dikeluarkan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh daerah tersebut. Sedangkan untuk penanaman modal baik penanaman modal asing ataupun investasi swasta, ada baiknya lebih digerakkan terutama bagi

daerah-daerah yang masih minim investasi seperti wilayah bagian timur Indonesia. Saat ini pemerintah telah mempermudah akses berinvestasi. Hal ini akan memicu timbulnya banyak industri baru di daerah sehingga akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dimana meliputi banyak terciptanya lapangan kerja sehingga akan berdampak pada perbaikan tingkat pendapatan masyarakat, pengurangan jumlah pengangguran, dll. Namun jika dampak baik investasi ini hanya dinikmati oleh kalangan tertentu saja, maka yang terjadi ialah kesenjangan akan semakin meningkat.

2. Dengan diberlakukannya kebijakan MP3EI pada 20 Mei 2011, diharapkan akan mampu merealisasikan tujuannya dimana untuk mewujudkan pertumbuhan yang seimbang dan berkelanjutan di seluruh pelosok negeri berdasarkan pembagian koridor wilayah ekonomi sesuai dengan potensi yang dimiliki, terutama pada Wilayah Indonesia bagian timur. Program ini cukup bagus diterapkan dalam prospek pembangunan di Indonesia. Untuk itu pemerintah harus benar-benar menjalankan kebijakan ini sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dengan cara mensosialisasikan program ini ke seluruh kalangan masyarakat tanpa terkecuali agar masyarakat mengerti bagaimana kebijakan yang nantinya diterapkan pemerintah untuk membangun negeri. Karena suatu program tidak akan berhasil apabila elemen-elemen didalamnya tidak turut mendukung.

DAFTAR PUSTAKA

- Adipuryanti., Ni Luh Putu. Yuni, I K. Sudibia. 2015. Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk Yang Bekerja Dan Investasi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Melalui Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *Piramida jurnal kependudukan dan pengembangan sumber daya manusia volume XI NO. 1:20-28 2015 ISSN : 1907-3275.*
- Adisamita, R. 2005. *Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah Edisi Pertama.* Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Agusta, I. 2014. *Ketimpangan Wilayah dan Kebijakan Penanggulangan Di Indonesia: Kajian Isu Strategis, Historis, dan Paradigmatik Sejak Pra Kolonial.* Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Anonim. 2011. *Sustaining Partnership Media Informasi Kerjasama Pemerintah dan Daerah Edisi Khusus Konektivitas Nasional 2011.* Jakarta: Infrastructure Reform Sector development Program (IRSDP) BAPPENAS.
- Baltagi, B. H. 2005. *Econometrics Analysis of Panel Data (3rd ed).* Chicester, England: John Wiley & Sons Ltd.
- Basuki, A. T. 2014. *Regresi Model Pam, Ecm Dan Data Panel Dengan Eviews 7 Katalog Dalam Terbitan (KDT).* Yogyakarta: 2014.
- Berg, A, dan T. Nilsson. 2010. Do Liberalization And Globalization Increase Income Inequality?.Sweden. *European Journal of Political Economy* 26 (2010) 488–505.
- Boediono. 1981. *Teori Pertumbuhan Ekonomi Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No.4.* Yogyakarta: BPFE.
- Chambers, D, dan S. Dhongde. 2016. Convergence In Income Distributions: Evidence From A Panel Of Countries. *United States. Department of Economics and Finance, Salisbury University, United States, School of Economics, Georgia Institute of Technology, United States Economic Modelling* 59 (2016) 262–270.
- Dajan, A. 1986. *Pengantar Metode Statistik Jilid 1.* Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia.
- Dhyatmika, K.W, dan. H. D. Atmanti. 2013. Analisis Ketimpangan Pembangunan Provinsi Banten Pasca Pemekaran. *Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013, Halaman 1- 8 ISSN (Online): 2337-3814.*

- Elhrost, J. P. Spatial Panel Data Models. *University of Groningen*. www.regroningen.nl/elhorst or <http://www.rug.nl/staff/j.p.elhorst/projects>.
- Esther, K., L. J. Sinay, A. M. Sahusilawane. 2015. *Pembangunan Perekonomian Maluku* Ed.1, Cet.1--. Yogyakarta: Deepublish.
- Fitriani, R. 2016. Ekonometrika. *Program Studi Statistika, semester Ganjil 2012/2013, Universitas Brawijaya*.
- Ginting, A. M. 2015. Pengaruh Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah Terhadap Kemiskinan di Indonesia 2004-2013. *Kajian Vol.20 No. 1 Maret 2015 hal 45-58*.
- Gujarati, D. N. 2004. *Dasar-Dasar Ekonometrika: Salemba Empat*.
- Hamdi, A. S, dan E. Baharudin. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi Dalam Pendidikan-Ed Cet 1*. Yogyakarta: Deepublish.
- Haris, S., *et al.* 2006. *Membangun Format Baru Otonomi Daerah*. Jakarta: LIPI Press.
- Hasna, S. 2013. Analisis Spasial Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal BPPK, Volume 6 Nomor 2, 2013, Halaman 1-18*.
- Hidayat, M. H. 2014. Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, Dan Ipm Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2012. *Skripsi Universitas Diponegoro*.
- Jhingan, M.L. 2003. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Laswinia, V. D, dan M. S. Chamid. 2016. Analisis Pola Hubungan Persentase Penduduk Miskin dengan Faktor Lingkungan, Ekonomi, dan Sosial di Indonesia Menggunakan Regresi Spasial. *Jurnal Sains Dan Seni Its Vol. 5 No. 2 (2016) 2337-3520 (2301-928x Print)*.
- Li, S, dan Z. Xu. 2008. The Trend of Regional Income Disparity in the People's Republic of China. *ADB Discussion Paper 85. Tokyo: Asian Development Bank Institute*. Available: <http://www.adbi.org/discussionpaper/2008/01/25/2468.regional.income.disparity.prc/>.
- Makmun. 2008. Studi Kemampuan Daerah dalam Memberikan Subsidi Listrik. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan-ISSN 0854-526X 134/Akred-LIPI/P2MBI/06/2008 Vol.XV(1), 2008*.

- Nurhuda, R., M.R.K. Muluk, Y. P. Prasetyo. 2013. Analisis Ketimpangan Pembangunan (Studi Kasus Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2011). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, Nomor 4, Hal. 110-119.
- Pamungkas, C. P. 2009. Analisis Spasial Keterkaitan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Kemiskinan Di Jawa Timur. *Jurnal Riset Ekonomi Tahun I/No. 3/Desember 2009*.
- Puntri, Q. G. 2016 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesenjangan Pendapatan (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Dan Jawa Timur Tahun 2011-2013). *Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Putri, Ni, Putu, Shanty, Valentiana dan Natha, I, Ketut, Suardika. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Lokasi Umum, Belanja Modal Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan. *E-jurnal EP Unud*, 4 (1) : 41-49 ISSN: 2303-9178.
- Rahayu, I, dan M. Romzi. 2012. Pengembangan Aplikasi Analisis Model Regresi Spasial Untuk Data *Cross Section* Dan Panel. *Jurnal Aplikasi Statistika & Komputasi Statistik, Uppm – Stis Tahun 4, Volume 2, Desember 2012*.
- Rokhaniyah, S, dan M. R. Nugroho. 2011. Analisis Flaypaper Pada Belanja Pemerintah Kota dan Kabupaten di Indonesia tahun 2006-2008. *Fokus Ekonomi (FE)*, Agustus 2011, Hal. 100 – 113 ISSN: 1412-3851 Vol. 10, No. 2.
- Rosidah, E. 2016. Analisis Spasial Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Jawa Timur Tahun 2010 – 2014. *Skripsi UNEJ*.
- Rossa, Y. D, dan I. Sovita. 2016. Analisis Faktor-Faktir Yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Pulau Jawa. *Menara Ekonomi: ISSN: 2470 – 8585 Volume II No. 4 – Oktober 2016*.
- Rubiarko, S. I. 2013. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Disparitas Pendapatan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2011. *Universitas Brawijaya Malang, Artikel jurnal*.
- Rustiadi, E., S. S. Hakim, D. R. Panuju. 2011. Perencanaan dan pengembangan Wilayah edisi kedua. Jakarta: Yayasan Puataka Obor Indonesia.
- Semiaan, C. R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

- Setiawati, A. K, dan Setiawan. 2013. Pemodelan Persentase Penduduk Miskin Di Jawa Timur Dengan Pendekatan Ekonometrika Panel Spasial. *ITS-paper-12021130002392/24626*
- Sjafrijal. 2008. *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*. Padang: Baduose Media.
- Sugiarto, E. 2015. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Suaka Media.
- Sukmaraga, P. 2011. Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, PDRB Per Kapita, dan Jumlah Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah. *Eprints.undip.ac.id/26773/1/jurnal.pdf*.
- Suliswanto, M. S. W. 2010. Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDRB) dan indeks pembangunna manusia (IPM) Terhadap Angka Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol 8 NO. 3 Desember 2010*.
- Sumodiningrat, G. 1998. *Membangun Perekonomian Rakyat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dwngan IDEA.
- Tarigan, R. 2003. *Ekonomi Regional Teori Dan Aplikasi Edisi Revisi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Todaro, M. P, dan S. C. Smith. 2006. *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Wahyuni, I Gusti Ayu Putri., Sukarsa. M. Yuliarmi. N. 2014. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesenjangan Pendapatan Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *ISSN : 2337-3067 E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 3.8 (2014) :458-47*.
- Wijayanto, D. 2015. Pengaruh Liberalisasi Perdagangan Dan Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Dan Ketimpangan Wilayah Di Indonesia. *Skripsi Institut Pertanian Bogor*.
- Yustika, A. E. 2004. *Perekonomian Indonesia: Deskripsi, Preskripsi, & Kebijakan*. Malang: Banyumedia Publishing.
- Zasriati, M. 2011. Pengaruh Alokasi Dan Perimbangan Terhadap Ketimpangan Ekonomi Regional Di Provinsi Jambi. *Tesis Universitas Andalas Padang*.

<http://www.dpr.go.id>

<http://pkps.bappenas.go.id>

<http://sipd.bangda.kemendagri.go.id>

<https://www.oecd.org/economy/Overview-Indonesia-2015-Bahasa.pdf>

<http://www.worldbank.org/in/news/feature/2015/12/08/indonesia-rising-divide>

<http://www.itjen.depkes.go.id>

<http://beritadaerah.co.id/2014/06/13/perbedaan-pendapatan-antar-provinsi-di-kawasan-timur-indonesia-2/>

www.bps.go.id





LAMPIRAN

Lampiran A. Data Variabel X dan Y

Tabel Data Wilayah I

Provinsi	Tahun	Indeks Gini (Persen)	PAD (Milyar Rupiah)	DAU (Milyar Rupiah)	PMA (Milyar Rupiah)	PMDN (Milyar Rupiah)	PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)
Aceh	2012	0.32	901,720,376,000	911,080,707,000	1,615,987,926,470	60,188,000,000	23,099,130
Aceh	2013	0.34	1,325,435,091,000	1,092,445,518,000	984,175,203,927	3,636,419,300,000	23,228,590
Aceh	2014	0.32	1,731,130,840,000	1,201,612,787,000	369,801,174,750	5,110,289,500,000	23,128,510
Aceh	2015	0.33	1,985,835,617,000	1,237,894,986,000	283,763,791,527	4,192,413,600,000	22,525,480
Sumatera Utara	2012	0.33	4,052,104,891,000	1,103,389,237,000	6,053,370,159,502	2,550,264,400,000	28,036,880
Sumatera Utara	2013	0.35	4,091,285,887,000	1,223,445,404,000	9,275,088,164,103	5,068,881,400,000	29,339,210
Sumatera Utara	2014	0.32	4,416,811,865,000	1,349,132,276,000	6,542,984,568,330	4,223,812,500,000	30,477,070
Sumatera Utara	2015	0.34	4,883,880,619,000	1,139,261,371,000	16,687,682,927,514	4,287,417,300,000	31,637,410
Sumatera Barat	2012	0.36	1,225,466,023,000	918,560,365,000	703,718,733,878	885,276,900,000	23,744,010
Sumatera Barat	2013	0.36	1,366,178,102,000	1,039,922,511,000	954,862,246,488	677,770,000,000	24,857,640
Sumatera Barat	2014	0.33	1,729,222,284,000	1,129,886,306,000	1,331,670,273,850	421,132,200,000	25,978,010
Sumatera Barat	2015	0.34	1,876,733,122,000	1,221,128,606,000	765,128,778,798	1,552,489,500,000	27,044,080
Riau	2012	0.4	2,588,688,445,000	489,179,914,000	10,814,228,575,411	5,450,431,500,000	72,396,340
Riau	2013	0.37	2,725,623,913,000	726,630,916,000	13,638,869,140,488	4,874,268,500,000	72,297,050
Riau	2014	0.35	3,245,087,745,000	820,984,584,000	16,268,102,751,670	7,707,546,000,000	72,385,200
Riau	2015	0.36	3,476,960,098,000	654,220,250,000	8,750,242,220,559	9,943,044,300,000	70,761,080
Jambi	2012	0.34	995,822,608,000	731,952,242,000	1,466,359,449,502	1,445,678,700,000	32,417,720
Jambi	2013	0.35	1,063,922,065,000	836,578,062,000	358,411,966,821	2,799,615,800,000	34,012,100
Jambi	2014	0.33	1,281,239,473,000	948,337,712,000	611,095,773,120	907,940,300,000	35,876,080
Jambi	2015	0.36	1,241,237,022,000	1,009,165,864,000	1,442,739,694,449	3,540,242,000,000	36,753,390

Sumber: BPS, NSWI BKPM diolah

Lanjutan Tabel Data Wilayah I

Provinsi	Tahun	Indeks Gini (Persen)	PAD (Milyar Rupiah)	DAU (Milyar Rupiah)	PMA (Milyar Rupiah)	PMDN (Milyar Rupiah)	PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)
Sumatera Selatan	2012	0.4	2,001,739,389,000	716,153,261,000	7,377,193,644,915	2,930,597,100,000	28,577,890
Sumatera Selatan	2013	0.38	2,021,696,787,000	870,516,767,000	5,078,510,897,943	3,395,984,300,000	29,656,760
Sumatera Selatan	2014	0.4	2,407,905,239,000	985,542,760,000	12,549,606,875,820	7,042,762,700,000	30,610,580
Sumatera Selatan	2015	0.36	2,534,526,413,000	931,915,470,000	8,648,826,170,946	10,944,085,300,000	31,546,620
Bengkulu	2012	0.35	483,768,275,000	775,311,166,000	285,454,648,090	52,639,600,000	18,143,510
Bengkulu	2013	0.39	525,207,935,000	854,647,828,000	233,312,203,332	109,608,100,000	18,919,300
Bengkulu	2014	0.36	672,064,468,000	955,095,187,000	229,456,684,590	7,800,000,000	19,626,470
Bengkulu	2015	0.38	701,300,383,000	1,046,080,820,000	275,585,315,448	553,915,700,000	20,303,750
Lampung	2012	0.36	1,687,701,199,000	939,139,287,000	1,072,368,998,917	304,228,400,000	21,794,830
Lampung	2013	0.36	1,771,297,935,000	1,060,663,183,000	492,948,193,584	1,325,342,400,000	22,770,680
Lampung	2014	0.35	2,274,685,573,000	1,136,053,041,000	1,858,823,288,700	3,495,703,000,000	23,646,330
Lampung	2015	0.38	2,247,342,668,000	1,097,129,439,000	3,451,461,538,614	1,102,294,000,000	24,580,270
Kep. Bangka Belitung	2012	0.29	438,373,573,000	634,087,815,000	555,163,373,526	533,460,800,000	31,172,420
Kep. Bangka Belitung	2013	0.31	495,796,075,000	717,140,118,000	1,174,656,647,862	608,204,400,000	32,081,300
Kep. Bangka Belitung	2014	0.3	562,928,837,000	806,820,146,000	1,247,741,769,540	615,407,900,000	32,859,640
Kep. Bangka Belitung	2015	0.28	571,802,890,000	897,887,443,000	1,107,021,755,307	1,023,739,000,000	33,480,090
Kep.Riau	2012	0.35	723,053,960,000	460,857,807,000	5,038,307,839,173	43,471,900,000	70,930,000
Kep.Riau	2013	0.36	907,982,039,000	656,067,610,000	3,299,812,095,237	417,661,000,000	73,743,330
Kep.Riau	2014	0.4	1,070,208,289,000	698,009,318,000	4,657,656,041,010	28,455,000,000	76,329,650
Kep.Riau	2015	0.36	1,012,146,824,000	695,943,711,000	8,576,502,836,961	612,054,700,000	78,643,000
Kalimantan Barat	2012	0.38	1,164,425,412,000	1,023,229,807,000	3,729,031,462,572	2,810,997,700,000	21,062,220
Kalimantan Barat	2013	0.4	1,347,396,425,000	1,144,712,840,000	6,792,919,143,213	2,522,134,600,000	21,971,930

Sumber: BPS, NSWI BKPM diolah

Lanjutan Tabel Data Wilayah I

Provinsi	Tahun	Indeks Gini (Persen)	PAD (Milyar Rupiah)	DAU (Milyar Rupiah)	PMA (Milyar Rupiah)	PMDN (Milyar Rupiah)	PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)
Kalimantan Barat	2014	0.39	1,621,610,891,000	1,290,222,856,000	11,475,723,032,060	4,320,866,000,000	22,712,400
Kalimantan Barat	2015	0.33	1,702,542,350,000	1,405,594,169,000	17,887,881,992,490	6,143,530,300,000	23,438,530
Kalimantan Tengah	2012	0.33	945,362,708,000	951,256,068,000	4,922,247,087,820	4,529,629,900,000	27,749,010
Kalimantan Tengah	2013	0.35	1,093,821,486,000	1,062,516,940,000	5,033,008,768,365	1,835,270,900,000	29,106,400
Kalimantan Tengah	2014	0.35	1,253,708,122,000	1,152,422,738,000	11,296,793,072,180	980,388,888,888	30,216,870
Kalimantan Tengah	2015	0.33	1,174,969,267,000	1,280,595,484,000	12,502,345,450,491	1,270,118,900,000	31,619,240
Kalimantan Selatan	2012	0.38	2,517,518,566,000	652,535,312,000	2,554,198,587,607	3,509,791,600,000	25,547,770
Kalimantan Selatan	2013	0.36	2,502,279,216,000	683,511,441,000	2,723,828,733,441	8,299,226,800,000	26,423,900
Kalimantan Selatan	2014	0.36	2,898,704,954,000	701,725,536,000	5,968,745,972,280	2,616,451,400,000	27,223,310
Kalimantan Selatan	2015	0.35	2,684,908,314,000	571,244,699,000	12,872,435,219,835	2,060,364,900,000	27,793,560
Kalimantan Timur	2012	0.36	5,409,949,386,000	52,637,761,000	18,030,820,563,136	5,788,481,000,000	124,501,880
Kalimantan Timur	2013	0.37	5,885,262,004,000	55,539,336,500	13,796,345,600,418	15,825,662,900,000	133,868,680
Kalimantan Timur	2014	0.35	6,663,113,275,000	57,312,515,000	25,486,853,757,330	12,859,045,700,000	132,903,980
Kalimantan Timur	2015	0.32	4,861,546,726,000	57,312,515,000	31,892,203,838,331	9,611,313,100,000	128,322,890
Kalimantan Utara	2012	0.36	5,409,949,386,000	52,637,761,000	862,082,230,014	100,790,500,000	82,680,000
Kalimantan Utara	2013	0.33	1,356,851,032	55,539,336,500	639,745,079,892	231,311,700,000	88,420,000
Kalimantan Utara	2014	0.33	11,833,885,000	20,567,986,000	1,286,693,090,900	642,792,600,000	96,360,000
Kalimantan Utara	2015	0.29	370,047,613,000	651,247,428,000	3,092,468,355,612	921,792,000,000	97,860,000

Sumber: BPS, NSWI BKPM diolah

Tabel Data Wilayah II

Provinsi	Tahun	Indeks Gini (Persen)	PAD (Milyar Rupiah)	DAU (Milyar Rupiah)	PMA (Milyar Rupiah)	PMDN (Milyar Rupiah)	PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)
DKI Jakarta	2012	0.42	22,040,801,448,000	275,327,857,000	38,532,023,115,112	8,540,071,000,000	123,962,380
DKI Jakarta	2013	0.43	26,852,192,453,000	299,182,466,000	27,080,833,264,812	5,754,462,700,000	130,060,310
DKI Jakarta	2014	0.43	31,274,215,886,000	85,985,282,000	53,563,564,147,240	17,811,427,900,000	136,312,390
DKI Jakarta	2015	0.43	33,686,176,815,000	0	48,470,795,778,225	15,512,725,000,000	142,868,580
Jawa Barat	2012	0.41	9,982,917,415,000	1,269,960,760,000	39,498,043,818,482	11,383,972,000,000	23,036,000
Jawa Barat	2013	0.41	12,360,109,870,000	1,472,453,011,000	74,464,764,401,559	9,006,138,200,000	24,118,310
Jawa Barat	2014	0.41	15,038,153,310,000	1,687,686,386,000	77,944,767,923,120	18,726,925,000,000	24,967,190
Jawa Barat	2015	0.41	16,032,856,414,000	1,303,654,355,000	76,852,689,744,171	26,272,867,800,000	25,840,540
Jawa Tengah	2012	0.38	6,629,308,010,000	1,516,892,951,000	2,265,482,377,914	5,797,108,300,000	20,950,620
Jawa Tengah	2013	0.39	8,212,800,641,000	1,670,859,369,000	4,852,566,910,452	12,593,649,000,000	21,844,870
Jawa Tengah	2014	0.38	9,916,358,231,000	1,803,931,189,000	5,503,936,214,980	13,601,583,600,000	22,820,160
Jawa Tengah	2015	0.38	10,904,825,813,000	1,629,429,283,000	11,388,499,147,272	15,410,714,600,000	23,882,470
DI Yogyakarta	2012	0.43	1,004,063,126,000	757,056,696,000	796,762,822,288	333,983,700,000	20,183,880
DI Yogyakarta	2013	0.44	1,216,102,750,000	828,334,768,000	309,135,847,454	283,832,500,000	21,037,700
DI Yogyakarta	2014	0.42	1,464,604,954,000	899,923,550,000	770,797,140,960	703,891,800,000	21,866,850
DI Yogyakarta	2015	0.43	1,593,110,770,000	920,544,722,000	1,193,302,200,426	362,366,800,000	22,684,710
Jawa Timur	2012	0.36	9,725,627,569,000	1,491,561,136,000	21,563,417,278,718	21,520,272,000,000	29,508,400
Jawa Timur	2013	0.36	11,596,376,615,000	1,632,648,287,000	35,495,508,213,117	34,848,932,500,000	31,092,040
Jawa Timur	2014	0.37	14,442,216,520,000	1,866,548,185,000	21,410,705,831,970	38,131,964,700,000	32,703,720
Jawa Timur	2015	0.42	15,402,647,675,000	1,587,261,707,000	34,730,431,000,281	35,489,794,200,000	34,272,860
Banten	2012	0.39	3,395,883,044,000	530,833,378,000	25,479,612,848,843	5,117,535,000,000	27,716,470

Sumber: BPS, NSWI BKPM diolah

Lanjutan Tabel Data Wilayah II

Provinsi	Tahun	Indeks Gini (Persen)	PAD (Milyar Rupiah)	DAU (Milyar Rupiah)	PMA (Milyar Rupiah)	PMDN (Milyar Rupiah)	PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)
Banten	2013	0.4	4,118,551,716,000	617,081,101,000	3,888,129,432,311	4,008,861,800,000	28,910,660
Banten	2014	0.4	4,899,125,741,000	728,490,012,000	24,167,911,081,930	8,081,298,400,000	29,834,210
Banten	2015	0.4	4,972,737,619,000	640,981,003,000	34,041,965,892,945	10,709,896,400,000	30,778,170
Bali	2012	0.43	2,042,091,096,000	694,079,080,000	4,521,702,558,742	3,107,955,100,000	26,689,580
Bali	2013	0.4	2,529,976,146,000	792,365,876,000	4,084,981,717,857	2,984,666,600,000	28,129,670
Bali	2014	0.42	2,920,416,689,000	832,297,473,000	5,073,973,826,390	252,798,200,000	29,666,840
Bali	2015	0.38	3,041,298,422,000	831,597,268,000	6,640,364,130,999	1,250,352,300,000	31,096,590
Nusa Tenggara Barat	2012	0.35	745,979,811,000	809,617,715,000	5,963,958,158,100	45,412,200,000	14,276,690
Nusa Tenggara Barat	2013	0.36	858,454,205,000	859,353,026,000	5,101,983,629,817	1,398,005,700,000	14,809,840
Nusa Tenggara Barat	2014	0.38	1,115,060,397,000	980,390,340,000	6,546,501,732,960	212,524,200,000	15,354,260
Nusa Tenggara Barat	2015	0.37	1,374,165,767,000	1,088,633,717,000	9,366,031,785,099	347,849,500,000	18,377,600
Nusa Tenggara Timur	2012	0.36	459,657,187,000	940,646,764,000	81,831,708,243	14,388,900,000	10,030,980
Nusa Tenggara Timur	2013	0.35	528,832,134,000	1,003,991,703,000	102,961,671,555	17,572,300,000	10,396,790
Nusa Tenggara Timur	2014	0.36	763,337,478,000	1,131,687,590,000	179,095,068,250	3,548,100,000	10,741,980
Nusa Tenggara Timur	2015	0.34	882,315,240,000	1,300,445,875,000	935,467,941,213	1,295,674,300,000	11,097,460

Sumber: BPS, NSWI BKPM diolah

Tabel Data Wilayah III

Provinsi	Tahun	Indeks Gini (Persen)	PAD (Milyar Rupiah)	DAU (Milyar Rupiah)	PMA (Milyar Rupiah)	PMDN (Milyar Rupiah)	PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)
Sulawesi Utara	2012	0.43	633,650,533,000	790,534,491,000	437,613,016,241	678,484,800,000	25,145,960
Sulawesi Utara	2013	0.42	789,631,755,000	885,684,277,000	686,720,852,631	66,759,300,000	26,445,860
Sulawesi Utara	2014	0.42	937,681,927,000	949,852,622,000	1,169,429,325,470	82,996,100,000	27,804,960
Sulawesi Utara	2015	0.37	1,012,945,961,000	1,026,948,809,000	1,177,890,721,350	270,633,600,000	29,193,980
Sulawesi Tengah	2012	0.4	605,821,437,000	902,087,729,000	7,565,575,327,090	602,808,700,000	22,724,470
Sulawesi Tengah	2013	0.41	662,226,616,000	994,658,685,000	8,936,212,943,223	605,344,900,000	24,490,980
Sulawesi Tengah	2014	0.37	824,611,352,000	1,087,885,014,000	17,748,112,799,410	95,833,700,000	25,315,770
Sulawesi Tengah	2015	0.37	904,937,124,000	1,221,602,865,000	14,532,485,072,277	968,447,600,000	28,793,140
Sulawesi Selatan	2012	0.41	2,198,776,396,000	996,939,584,000	5,464,820,101,888	2,318,863,400,000	24,507,170
Sulawesi Selatan	2013	0.43	2,560,045,632,000	1,089,771,438,000	4,836,641,112,846	921,017,400,000	26,083,420
Sulawesi Selatan	2014	0.42	3,029,122,239,000	1,209,598,741,000	3,336,943,498,910	4,949,546,800,000	27,750,740
Sulawesi Selatan	2015	0.42	3,270,828,511,000	1,180,010,167,000	3,124,969,327,605	9,215,326,600,000	29,427,320
Sulawesi Tenggara	2012	0.4	439,184,125,000	869,882,871,000	335,097,548,048	907,340,300,000	25,489,790
Sulawesi Tenggara	2013	0.43	514,857,030,000	981,035,741,000	903,187,537,797	1,261,621,500,000	26,815,360
Sulawesi Tenggara	2014	0.41	599,942,751,000	1,053,636,011,000	1,921,873,305,100	1,249,906,800,000	27,895,550
Sulawesi Tenggara	2015	0.4	667,079,210,000	1,176,423,577,000	1,941,962,873,715	2,015,402,200,000	29,201,160
Gorontalo	2012	0.44	180,039,376,000	582,140,302,000	331,264,720,694	164,925,800,000	16,650,270
Gorontalo	2013	0.44	214,684,375,000	652,284,261,000	268,614,840,918	84,361,000,000	17,639,120
Gorontalo	2014	0.41	281,920,210,000	734,279,438,000	48,634,511,520	45,121,100,000	18,622,340
Gorontalo	2015	0.42	289,557,151,000	845,395,651,000	92,689,841,961	94,306,000,000	19,476,210
Sulawesi Barat	2012	0.31	140,396,940,000	590,680,361,000	2,143,419,115	228,564,200,000	17,169,060

Sumber: BPS, NSWI BKPM diolah

Lanjutan Tabel Data Wilayah III

Provinsi	Tahun	Indeks Gini (Persen)	PAD (Milyar Rupiah)	DAU (Milyar Rupiah)	PMA (Milyar Rupiah)	PMDN (Milyar Rupiah)	PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)
Sulawesi Barat	2013	0.35	154,131,860,000	685,497,592,000	26,322,820,482	685,083,700,000	18,008,810
Sulawesi Barat	2014	0.35	223,704,906,000	776,214,122,000	192,810,941,260	690,075,900,000	19,235,600
Sulawesi Barat	2015	0.36	273,507,239,000	895,580,933,000	27,140,166,402	1,103,796,300,000	20,264,690
Maluku	2012	0.38	267,502,524,000	829,491,474,000	79,903,100,059	3,383,800,000	13,129,110
Maluku	2013	0.37	304,364,506,000	897,657,192,000	551,439,364,488	72,645,000,000	13,572,070
Maluku	2014	0.35	425,425,608,000	1,019,704,312,000	155,648,491,880	0	14,216,660
Maluku	2015	0.34	390,813,372,000	1,177,774,674,000	1,103,376,461,073	36,580,180,000	14,730,890
Maluku Utara	2012	0.34	115,905,322,000	703,159,025,000	846,614,904,943	320,506,200,000	15,692,010
Maluku Utara	2013	0.32	165,886,908,000	772,591,162,000	2,805,842,724,105	1,114,908,100,000	16,332,220
Maluku Utara	2014	0.32	203,059,698,000	906,623,550,000	1,172,524,810,450	156,405,900,000	16,867,380
Maluku Utara	2015	0.28	236,054,154,000	1,061,177,950,000	2,729,657,121,963	48,230,000,000	17,532,030
Papua Barat	2012	0.43	175,450,133,000	901,398,453,000	300,501,731,689	45,830,900,000	55,047,840
Papua Barat	2013	0.43	236,282,890,000	1,064,872,637,000	566,008,574,268	303,952,200,000	57,581,360
Papua Barat	2014	0.44	306,674,697,000	1,122,264,659,000	1,821,512,360,570	100,061,200,000	59,174,520
Papua Barat	2015	0.44	322,799,289,000	1,284,079,495,000	3,463,263,881,775	63,447,600,000	60,065,890
Papua	2012	0.44	623,162,648,000	1,569,782,444,000	11,279,286,736,714	54,676,100,000	36,280,030
Papua	2013	0.44	597,707,375,000	1,889,267,850,000	24,665,230,064,589	584,253,100,000	38,621,360
Papua	2014	0.41	944,929,692,000	1,991,202,341,100	14,973,826,554,050	249,854,800,000	39,332,990
Papua	2015	0.42	912,908,312,000	2,277,932,698,000	12,013,247,939,742	1,275,221,800,000	41,681,230

Sumber: BPS, NSWI BKPM diolah

Lampiran B. Data Rata-Rata

Tabel Data Rata-Rata Wilayah I

Provinsi	Indeks Gini (Persen)	PAD (Milyar Rupiah)	PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)	DAU (Milyar Rupiah)	PMDN (Milyar Rupiah)	PMA (Milyar Rupiah)
Aceh	0.328	1349392419600	22937302	1031936034000	2651745600000	690175186874
Sumatera Utara	0.338	4204509068800	29240362	1152819158400	3560673580000	9035248120337
Sumatera Barat	0.348	1468980660200	24852498	1014835736600	912578180000	791337869794
Riau	0.368	2849298196600	71895512	614213357500	7087577500000	10267133285099
Jambi	0.344	1113290749600	33983190	821983258600	2165680800000	809913100583
Sumatera Selatan	0.376	2162997548000	29509966	830188311800	5076460200000	7709430561338
Bengkulu	0.368	564653854800	18855060	847704607400	973807921747	280363012221
Lampung	0.364	1875340619200	22706284	1000591597600	1410398940000	1514709905218
Kep. Bangka Belitung	0.296	505621937000	31960926	707505087400	659041840000	1073365260967
Kep. Riau	0.358	866858506800	73534038	581324797600	494409960000	4700291521302
Kalimatan Barat	0.38	1383286226000	21882448	1141848712000	3440306300000	8856285391691
Kalimantan Tengah	0.34	1056621269600	29056084	1048521513000	2398278497778	7705485465937
Kalimantan Selatan	0.364	2494401368800	26311212	622778628000	3720830140000	5301538318867
Kalimantan Timur	0.356	5374216283800	128158732	54849794500	10027899120000	18768578909862
Kalimantan Utara	0.328	1968879552606	88470000	166287871300	482157080000	1306682570229

Sumber: BPS, NSWI BKPM diolah

Tabel Data Rata-Rata Wilayah II

Provinsi	Indeks Gini (Persen)	PAD (Milyar Rupiah)	PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)	DAU (Milyar Rupiah)	PMDN (Milyar Rupiah)	PMA (Milyar Rupiah)
DKI Jakarta	0.43	26335874717800	130175316	174081009400	11375018000000	42000033577840
Jawa Barat	0.41	12383336032800	23987714	1383061524000	15316832400000	60493577020387
Jawa Tengah	0.382	8245505169400	21910384	1579458603000	10028177580000	5109317448104
DI Yogyakarta	0.424	1228998897000	21032118	805334412800	337132900000	618226048712
Jawa Timur	0.376	12013097012400	31088256	1585104202800	27935700300000	24943820174378
Banten	0.398	4056373534200	28757690	595553835400	6443232460000	21328793490622
Bali	0.408	2451480017800	28169728	742202647200	1581839400000	4910696534128
Nusa Tenggara Barat	0.364	966990271000	15504832	876933176200	409221680000	6212320903853
Nusa Tenggara Timur	0.354	605194154400	10388620	1025765875200	266436720000	269513967309

Tabel Data Rata-Rata Wilayah III

Provinsi	Indeks Gini (Persen)	PAD (Milyar Rupiah)	PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)	DAU (Milyar Rupiah)	PMDN (Milyar Rupiah)	PMA (Milyar Rupiah)
Sulawesi Utara	0.406	781799630200	26480746	854546241200	286092620000	1080941068572
Sulawesi Tengah	0.386	703514189000	24486012	989879210400	978521900000	10406787397525
Sulawesi Selatan	0.418	2603657736000	26107568	1058615579800	4278211360000	3509939529952
Sulawesi Tenggara	0.41	513446589400	26547986	956362951400	1098662500000	1050266266211
Gorontalo	0.434	224856885800	17615118	655043550800	80096280000	170266416351
Sulawesi Barat	0.342	181210366000	18140322	677910361200	585232180000	59545646159
Maluku	0.37	321997626600	13625184	925724321000	22536256000	398609764149

Sumber: BPS, NSWI BKPM diolah

Lanjutan Tabel Data Rata-Rata Wilayah III

Provinsi	Indeks Gini (Persen)	PAD (Milyar Rupiah)	PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)	DAU (Milyar Rupiah)	PMDN (Milyar Rupiah)	PMA (Milyar Rupiah)
Maluku Utara	0.318	161143534000	16283654	796788299600	330710040000	1738920381025
Papua Barat	0.428	238674183600	57281894	1014612030800	112091600000	1288354706786
Papua	0.426	688361755400	38459770	4098209048220	708371320000	14890143527560

Sumber: BPS, NSWI BKPM diolah

Lampiran C. Data Log Rata-Rata

Tabel Data Log Rata-Rata Wilayah I

PROVINSI	LOG_GINI	PAD (Milyar Rupiah)	PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)	DAU (Milyar Rupiah)	PMDN (Milyar Rupiah)	PMA (Milyar Rupiah)
Aceh	-0.484126156	1349392419600	22937302	1031936034000	2651745600000	690175186874
Sumatera Utara	-0.4710833	4204509068800	29240362	1152819158400	3560673580000	9035248120337
Sumatera Barat	-0.458420756	1468980660200	24852498	1014835736600	912578180000	791337869794
Riau	-0.434152181	2849298196600	71895512	614213357500	7087577500000	10267133285099
Jambi	-0.463441557	1113290749600	33983190	821983258600	2165680800000	809913100583
Sumatera Selatan	-0.424812155	2162997548000	29509966	830188311800	5076460200000	7709430561338
Bengkulu	-0.434152181	564653854800	18855060	847704607400	973807921747	280363012221
Lampung	-0.438898616	1875340619200	22706284	1000591597600	1410398940000	1514709905218
Kep. Bangka Belitung	-0.528708289	505621937000	31960926	707505087400	659041840000	1073365260967
Kep. Riau	-0.446116973	866858506800	73534038	581324797600	494409960000	4700291521302
Kalimatan Barat	-0.420216403	1383286226000	21882448	1141848712000	3440306300000	8856285391691
Kalimantan Tengah	-0.468521083	1056621269600	29056084	1048521513000	2398278497778	7705485465937
Kalimantan Selatan	-0.438898616	2494401368800	26311212	622778628000	3720830140000	5301538318867
Kalimantan Timur	-0.448550002	5374216283800	128158732	54849794500	10027899120000	18768578909862
Kalimantan Utara	-0.484126156	1968879552606	88470000	166287871300	482157080000	1306682570229

Sumber: BPS, NSWI BKPM diolah

Tabel Data Log Rata-Rata Wilayah II

PROVINSI	LOG_GINI	PAD (Milyar Rupiah)	PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)	DAU (Milyar Rupiah)	PMDN (Milyar Rupiah)	PMA (Milyar Rupiah)
DKI Jakarta	-0.366531544	26335874717800	130175316	174081009400	11375018000000	42000033577840
Jawa Barat	-0.387216143	12383336032800	23987714	1383061524000	15316832400000	60493577020387
Jawa Tengah	-0.417936637	8245505169400	21910384	1579458603000	10028177580000	5109317448104
DI Yogyakarta	-0.372634143	1228998897000	21032118	805334412800	337132900000	618226048712
Jawa Timur	-0.424812155	12013097012400	31088256	1585104202800	27935700300000	24943820174378
Banten	-0.400116928	4056373534200	28757690	595553835400	6443232460000	21328793490622
Bali	-0.389339837	2451480017800	28169728	742202647200	1581839400000	4910696534128
Nusa Tenggara Barat	-0.438898616	966990271000	15504832	876933176200	409221680000	6212320903853
Nusa Tenggara Timur	-0.450996738	605194154400	10388620	1025765875200	266436720000	269513967309

Sumber: BPS, NSWI BKPM diolah

Tabel Data Log Rata-Rata Wilayah III

PROVINSI	LOG_GINI	PAD (Milyar Rupiah)	PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)	DAU (Milyar Rupiah)	PMDN (Milyar Rupiah)	PMA (Milyar Rupiah)
Sulawesi Utara	-0.391473966	781799630200	26480746	854546241200	286092620000	1080941068572
Sulawesi Tengah	-0.413412695	703514189000	24486012	989879210400	978521900000	10406787397525
Sulawesi Selatan	-0.378823718	2603657736000	26107568	1058615579800	4278211360000	3509939529952
Sulawesi Tenggara	-0.387216143	513446589400	26547986	956362951400	1098662500000	1050266266211
Gorontalo	-0.36251027	224856885800	17615118	655043550800	80096280000	170266416351
Sulawesi Barat	-0.465973894	181210366000	18140322	677910361200	585232180000	59545646159
Maluku	-0.431798276	321997626600	13625184	925724321000	22536256000	398609764149
Maluku Utara	-0.49757288	161143534000	16283654	796788299600	330710040000	1738920381025
Papua Barat	-0.368556231	238674183600	57281894	1014612030800	112091600000	1288354706786
Papua	-0.370590401	688361755400	38459770	4098209048220	708371320000	14890143527560

Sumber: BPS, NSWI BKPM diolah

Lampiran D. Data Pada Peta

Tabel Data Pada Peta Wilayah I

PROVINSI	LOG_GINI	PAD (Milyar Rupiah)	PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)	DAU (Milyar Rupiah)	PMDN (Milyar Rupiah)	PMA (Milyar Rupiah)	GEOMETRY	KODE
Aceh	-0.484126156	1.35E+12	2.29E+07	1.03E+12	2.65E+12	6.90E+11	Geometrycollection Empty	1
Sumatera Utara	-0.4710833	4.20E+12	2.92E+07	1.15E+12	3.56E+12	9.04E+12	Geometrycollection Empty	15
Sumatera Barat	-0.458420756	1.47E+12	2.49E+07	1.01E+12	9.13E+11	7.91E+11	Geometrycollection Empty	13
Riau	-0.434152181	2.85E+12	7.19E+07	6.14E+11	7.09E+12	1.03E+13	Geometrycollection Empty	12
Jambi	-0.463441557	1.11E+12	3.40E+07	8.22E+11	2.17E+12	8.10E+11	Geometrycollection Empty	3
Sumatera Selatan	-0.424812155	2.16E+12	2.95E+07	8.30E+11	5.08E+12	7.71E+12	Geometrycollection Empty	14
Bengkulu	-0.434152181	5.65E+11	1.89E+07	8.48E+11	9.74E+11	2.80E+11	Geometrycollection Empty	2
Lampung	-0.438898616	1.88E+12	2.27E+07	1.00E+12	1.41E+12	1.51E+12	Geometrycollection Empty	11
Kep. Bangka Belitung	-0.528708289	5.06E+11	3.20E+07	7.08E+11	6.59E+11	1.07E+12	Geometrycollection Empty	9
Kep. Riau	-0.446116973	8.67E+11	7.35E+07	5.81E+11	4.94E+11	4.70E+12	Geometrycollection Empty	10
Kalimatan Barat	-0.420216403	1.38E+12	2.19E+07	1.14E+12	3.44E+12	8.86E+12	Geometrycollection Empty	8
Kalimantan Tengah	-0.468521083	1.06E+12	2.91E+07	1.05E+12	2.40E+12	7.71E+12	Geometrycollection Empty	5
Kalimantan Selatan	-0.438898616	2.49E+12	2.63E+07	6.23E+11	3.72E+12	5.30E+12	Geometrycollection Empty	4
Kalimantan Timur	-0.448550002	5.37E+12	1.28E+08	5.48E+10	1.00E+13	1.88E+13	Geometrycollection Empty	6
Kalimantan Utara	-0.484126156	1.97E+12	8.85E+07	1.66E+11	4.82E+11	1.31E+12	Geometrycollection Empty	7

Sumber: BPS, NSWI BKPM diolah

Tabel Data Pada Peta Wilayah II

PROVINSI	LOG_GINI	PAD (Milyar Rupiah)	PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)	DAU (Milyar Rupiah)	PMDN (Milyar Rupiah)	PMA (Milyar Rupiah)	GEOMETRY	KODE
DKI Jakarta	-0.366531544	2.63E+13	1.30E+08	1.74E+11	1.14E+13	4.20E+13	Geometrycollection Empty	4
Jawa Barat	-0.387216143	1.24E+13	2.40E+07	1.38E+12	1.53E+13	6.05E+13	Geometrycollection Empty	5
Jawa Tengah	-0.417936637	8.25E+12	2.19E+07	1.58E+12	1.00E+13	5.11E+12	Geometrycollection Empty	6
DI Yogyakarta	-0.372634143	1.23E+12	2.10E+07	8.05E+11	3.37E+11	6.18E+11	Geometrycollection Empty	3
Jawa Timur	-0.424812155	1.20E+13	3.11E+07	1.59E+12	2.79E+13	2.49E+13	Geometrycollection Empty	7
Banten	-0.400116928	4.06E+12	2.88E+07	5.96E+11	6.44E+12	2.13E+13	Geometrycollection Empty	2
Bali	-0.389339837	2.45E+12	2.82E+07	7.42E+11	1.58E+12	4.91E+12	Geometrycollection Empty	1
Nusa Tenggara Barat	-0.438898616	9.67E+11	1.55E+07	8.77E+11	4.09E+11	6.21E+12	Geometrycollection Empty	8
Nusa Tenggara Timur	-0.450996738	6.05E+11	1.04E+07	1.03E+12	2.66E+11	2.70E+11	Geometrycollection Empty	9

Sumber: BPS, NSWI BKPM diolah

Tabel Data Pada Peta Wilayah III

PROVINSI	LOG_GINI	PAD (Milyar Rupiah)	PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)	DAU (Milyar Rupiah)	PMDN (Milyar Rupiah)	PMA (Milyar Rupiah)	GEOMETRY	KODE
Sulawesi Utara	-0.391473966	7.82E+11	2.65E+07	8.55E+11	2.86E+11	1.08E+12	Geometrycollection Empty	10
Sulawesi Tengah	-0.413412695	7.04E+11	2.45E+07	9.90E+11	9.79E+11	1.04E+13	Geometrycollection Empty	8
Sulawesi Selatan	-0.378823718	2.60E+12	2.61E+07	1.06E+12	4.28E+12	3.51E+12	Geometrycollection Empty	7
Sulawesi Tenggara	-0.387216143	5.13E+11	2.65E+07	9.56E+11	1.10E+12	1.05E+12	Geometrycollection Empty	9
Gorontalo	-0.36251027	2.25E+11	1.76E+07	6.55E+11	8.01E+10	1.70E+11	Geometrycollection Empty	1
Sulawesi Barat	-0.465973894	1.81E+11	1.81E+07	6.78E+11	5.85E+11	5.95E+10	Geometrycollection Empty	6
Maluku	-0.431798276	3.22E+11	1.36E+07	9.26E+11	2.25E+10	3.99E+11	Geometrycollection Empty	2
Maluku Utara	-0.49757288	1.61E+11	1.63E+07	7.97E+11	3.31E+11	1.74E+12	Geometrycollection Empty	3
Papua Barat	-0.368556231	2.39E+11	5.73E+07	1.01E+12	1.12E+11	1.29E+12	Geometrycollection Empty	5
Papua	-0.370590401	6.88E+11	3.85E+07	4.10E+12	7.08E+11	1.49E+13	Geometrycollection Empty	4

Sumber: BPS, NSWI BKPM diolah

Lampiran E. Data Index Gini Berdasarkan BPS Indonesia (Persen)

Tabel Data Index Gini Wilayah I

Provinsi	2011	2012	2013	2014	2015
Aceh	0.33	0.32	0.34	0.32	0.33
Sumatera Utara	0.35	0.33	0.35	0.32	0.34
Sumatera Barat	0.35	0.36	0.36	0.33	0.34
Riau	0.36	0.4	0.37	0.35	0.36
Jambi	0.34	0.34	0.35	0.33	0.36
Sumatera Selatan	0.34	0.4	0.38	0.4	0.36
Bengkulu	0.36	0.35	0.39	0.36	0.38
Lampung	0.37	0.36	0.36	0.35	0.38
Kep. Bangka Belitung	0.3	0.29	0.31	0.3	0.28
Kep. Riau	0.32	0.35	0.36	0.4	0.36
Kalimantan Barat	0.4	0.38	0.4	0.39	0.33
Kalimantan Tengah	0.34	0.33	0.35	0.35	0.33
Kalimantan Selatan	0.37	0.38	0.36	0.36	0.35
Kalimantan Timur	0.38	0.36	0.37	0.35	0.32
Kalimantan Utara	0.33	0.36	0.33	0.33	0.29

Tabel Index Gini Wilayah II

Provinsi	2011	2012	2013	2014	2015
Dki Jakarta	0.44	0.42	0.43	0.43	0.43
Jawa Barat	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41
Jawa Tengah	0.38	0.38	0.39	0.38	0.38
Di Yogyakarta	0.4	0.43	0.44	0.42	0.43
Jawa Timur	0.37	0.36	0.36	0.37	0.42
Banten	0.4	0.39	0.4	0.4	0.4
Bali	0.41	0.43	0.4	0.42	0.38
Nusa Tenggara Barat	0.36	0.35	0.36	0.38	0.37
Nusa Tenggara Timur	0.36	0.36	0.35	0.36	0.34

Tabel Index Gini Wilayah III

Provinsi	2011	2012	2013	2014	2015
Sulawesi Utara	0.39	0.43	0.42	0.42	0.37
Sulawesi Tengah	0.38	0.4	0.41	0.37	0.37
Sulawesi Selatan	0.41	0.41	0.43	0.42	0.42
Sulawesi Tenggara	0.41	0.4	0.43	0.41	0.4
Gorontalo	0.46	0.44	0.44	0.41	0.42
Sulawesi Barat	0.34	0.31	0.35	0.35	0.36
Maluku	0.41	0.38	0.37	0.35	0.34
Maluku Utara	0.33	0.34	0.32	0.32	0.28

Lanjutan Tabel Index Gini Wilayah III

Provinsi	2011	2012	2013	2014	2015
Papua Barat	0.4	0.43	0.43	0.44	0.44
Papua	0.42	0.44	0.44	0.41	0.42



Lampiran F. Weight Matrix Berdasarkan Software Geoda**Weight Matrix Wilayah I**

```
0 15 WIL1_POLY_ID
1 1
15
2 3
14 13 3
3 5
14 13 12 10 2
4 1
6
5 2
7 6
6 3
7 5 4
7 3
8 5 6
8 1
7
9 0

10 1
3
11 1
14
12 3
15 13 3
13 4
15 2 3 12
14 3
11 2 3
15 3
12 13 1
```

Keterangan:

1 adalah kode wilayah
1 adalah banyaknya jumlah wilayah tetangga
15 adalah wilayah yang bertetangga dengan kode 1, dan seterusnya.

Weight Matrix Wilayah II

```

0 9 WIL2_POLY_ID
1 0
2 2
5 4
3 1
6
4 2
5 2
5 3
6 2 4
6 3
3 5 7
7 1
6
8 0
9 0

```

Keterangan:

1 adalah kode wilayah

0 adalah banyaknya jumlah wilayah tetangga

Weight Matrix Wilayah III

```

0 10 WIL3_POLY_ID
1 2
8 10
2 0
3 0
4 1
5
5 1
4
6 2
8 7
7 3
9 8 6
8 3
6 7 1
9 1
7
10 1
1

```

Keterangan:

1 adalah kode wilayah

2 adalah banyaknya jumlah wilayah tetangga

8 adalah wilayah yang bertetangga dengan kode 1

10 wilayah yang bertetangga dengan kode 1, dan seterusnya.

Lampiran G. Uji Lagrange Multiplier**Uji Lagrange Multiplier Wilayah I**

DIAGNOSTICS FOR SPATIAL DEPENDENCE
FOR WEIGHT MATRIX : WIL1.gal
(row-standardized weights)

TEST	MI/DF	VALUE	PROB
Moran's I (error)	0.1497	1.0293	0.30336
Lagrange Multiplier (lag)	1	8.5012	0.00355
Robust LM (lag)	1	9.7275	0.00182
Lagrange Multiplier (error)	1	0.3779	0.53874
Robust LM (error)	1	1.6042	0.20531
Lagrange Multiplier (SARMA)	2	10.1054	0.00639

===== END OF REPORT =====

Uji Lagrange Multiplier Wilayah II

DIAGNOSTICS FOR SPATIAL DEPENDENCE
FOR WEIGHT MATRIX : WIL2.gal
(row-standardized weights)

TEST	MI/DF	VALUE	PROB
Moran's I (error)	0.1518	-1.#IND	1.#QNaN
Lagrange Multiplier (lag)	1	7.0681	0.00785
Robust LM (lag)	1	7.5966	0.00585
Lagrange Multiplier (error)	1	0.2923	0.58877
Robust LM (error)	1	0.8208	0.36496
Lagrange Multiplier (SARMA)	2	7.8889	0.01936

===== END OF REPORT =====

Uji Lagrange Multiplier Wilayah III

DIAGNOSTICS FOR SPATIAL DEPENDENCE
FOR WEIGHT MATRIX : WIL3.gal
(row-standardized weights)

TEST	MI/DF	VALUE	PROB
Moran's I (error)	-0.1388	-0.0947	0.92454
Lagrange Multiplier (lag)	1	3.7163	0.05388
Robust LM (lag)	1	3.5342	0.06012
Lagrange Multiplier (error)	1	0.1824	0.66928
Robust LM (error)	1	0.0003	0.98699
Lagrange Multiplier (SARMA)	2	3.7166	0.15594

===== END OF REPORT =====

Lampiran H. Hasil Regresi Spasial

Hasil Regresi Spasial Wilayah I (*Spatial Lag Model*)

SUMMARY OF OUTPUT: SPATIAL LAG MODEL - MAXIMUM LIKELIHOOD ESTIMATION

Data set : WIL1
 Spatial Weight : WIL1.gal
 Dependent Variable : LOG_GINI Number of Observations: 15
 Mean dependent var :-0.456282 Number of Variables : 7
 S.D. dependent var : 0.0273969 Degrees of Freedom : 8
 Lag coeff. (Rho) :-0.178961

R-squared :0.695629 Log likelihood : 41.5114
 Sq. Correlation : - Akaike info criterion : -69.0227
 Sigma-square :0.000228458 Schwarz criterion: -64.0664
 S.E of regression : 0.0151148

Variable	Coefficient	Std.Error	z-value	Probability
W_LOG_GINI	-0.1789607	0.03763798	-4.75479	0.00000
CONSTANT	-0.4625358	0.03766889	-12.27898	0.00000
PAD	-8.622154e-015	5.453748e-015	-1.58096	0.11389
PDRB Per K	-7.86217e-010	3.895427e-010	-2.018308	0.04356
DAU	-5.465344e-014	3.328282e-014	-1.642092	0.10057
PMDN	2.023717e-015	3.727832e-015	0.5428669	0.58722
PMA	3.342188e-015	2.099789e-015	1.591678	0.11146

REGRESSION DIAGNOSTICS
 DIAGNOSTICS FOR HETEROSKEDASTICITY
 RANDOM COEFFICIENTS

TEST	DF	VALUE	PROB
Breusch-Pagan test	5	4.5010	0.47974

DIAGNOSTICS FOR SPATIAL DEPENDENCE
 SPATIAL LAG DEPENDENCE FOR WEIGHT MATRIX : WIL1.gal

TEST	DF	VALUE	PROB
Likelihood Ratio Test	1	13.5645	0.00023

===== END OF REPORT =====

Hasil Regresi Spasial Wilayah I (*Spatial Error Model*)

SUMMARY OF OUTPUT: SPATIAL ERROR MODEL - MAXIMUM LIKELIHOOD ESTIMATION

Data set : WIL1
 Spatial Weight : WIL1.gal
 Dependent Variable :LOG_GINI Number of Observations: 15
 Mean dependent var :-0.456282 Number of Variables : 6
 S.D. dependent var :0.027397 Degrees of Freedom : 9
 Lag coeff. (Lambda) : 0.943598

R-squared : 0.757771 R-squared (BUSE) : -
 Sq. Correlation : - Log likelihood :
 37.964542
 Sigma-square :0.000181815 Akaike info criterion:-63.9291
 S.E of regression :0.0134839 Schwarz criterion : -59.6808

Variable	Coefficient	Std.Error	z-value	Probability
CONSTANT	-0.4724773	0.03717324	-12.71015	0.00000
PAD	-1.063622e-014	4.195553e-015	-2.535118	0.01124
PDRB Per K	-6.154772e-010	3.587761e-010	-1.715491	0.08626
DAU	-4.482738e-014	3.377603e-014	-1.327195	0.18444
PMDN	-6.001361e-016	2.659155e-015	-0.2256868	0.82145
PMA	5.574353e-015	1.910574e-015	2.917632	0.00353
LAMBDA	0.9435976	0.02845345	33.16285	0.00000

REGRESSION DIAGNOSTICS
 DIAGNOSTICS FOR HETEROSKEDASTICITY
 RANDOM COEFFICIENTS

TEST	DF	VALUE	PROB
Breusch-Pagan test	5	3.1193	0.68161

DIAGNOSTICS FOR SPATIAL DEPENDENCE
 SPATIAL ERROR DEPENDENCE FOR WEIGHT MATRIX : WIL1.gal

TEST	DF	VALUE	PROB
Likelihood Ratio Test	1	6.4709	0.01097

===== END OF REPORT =====

Hasil Regresi Spasial Wilayah II (*Spatial Lag Model*)

SUMMARY OF OUTPUT: SPATIAL LAG MODEL - MAXIMUM LIKELIHOOD ESTIMATION

Data set : WIL2
 Spatial Weight : WIL2.gal
 Dependent Variable : LOG_GINI Number of Observations: 9
 Mean dependent var :-0.405387 Number of Variables : 7
 S.D. dependent var :0.027761 Degrees of Freedom : 2
 Lag coeff. (Rho) :-0.152607

R-squared :0.919500 Log likelihood :30.793
 Sq. Correlation : - Akaike info criterion :-47.586
 Sigma-square :6.20394e-005 Schwarz criterion:-46.2054
 S.E of regression :0.00787651

Variable	Coefficient	Std.Error	z-value	Probability
W_LOG_GINI	-0.1526073	0.02113703	-7.219903	0.00000
CONSTANT	-1.029329	0.1178996	-8.730557	0.00000
PAD	-6.132336e-014	1.162816e-014	-5.273695	0.00000
PDRB Per K	1.451412e-008	2.737907e-009	5.301173	0.00000
DAU	4.544656e-013	9.086704e-014	5.001435	0.00000
PMDN	-1.873431e-015	6.665756e-016	-2.81053	0.00495
PMA	6.491285e-015	1.16689e-015	5.562895	0.00000

REGRESSION DIAGNOSTICS
 DIAGNOSTICS FOR HETEROSKEDASTICITY
 RANDOM COEFFICIENTS

TEST	DF	VALUE	PROB
Breusch-Pagan test	5	2.6145	0.75916

DIAGNOSTICS FOR SPATIAL DEPENDENCE
 SPATIAL LAG DEPENDENCE FOR WEIGHT MATRIX : WIL2.gal

TEST	DF	VALUE	PROB
Likelihood Ratio Test	1	16.9708	0.00004

===== END OF REPORT =====

Hasil Regresi Spasial Wilayah II (*Spatial Error Model*)

SUMMARY OF OUTPUT: SPATIAL ERROR MODEL - MAXIMUM LIKELIHOOD ESTIMATION

Data set : WIL2
 Spatial Weight : WIL2.gal
 Dependent Variable : LOG_GINI Number of Observations: 9
 Mean dependent var : -0.405387 Number of Variables : 6
 S.D. dependent var : 0.027761 Degrees of Freedom : 3
 Lag coeff. (Lambda) : 0.961607

R-squared : 0.943399 R-squared (BUSE): -
 Sq. Correlation :- Log likelihood : 29.211025
 Sigma-square : 4.36209e-005 Akaike info criterion: -46.422
 S.E of regression : 0.00660461 Schwarz criterion : -45.2387

Variable	Coefficient	Std.Error	z-value	Probability
CONSTANT	-1.280729	0.1604913	-7.980054	0.00000
PAD	-8.465642e-014	1.530616e-014	-5.530874	0.00000
PDRB Per K	2.008119e-008	3.62882e-009	5.533808	0.00000
DAU	6.536427e-013	1.25666e-013	5.20143	0.00000
PMDN	-1.914915e-015	4.548082e-016	-4.210379	0.00003
PMA	8.241206e-015	1.299733e-015	6.340693	0.00000
LAMBDA	0.9616069	0.02753525	34.92275	0.00000

REGRESSION DIAGNOSTICS

DIAGNOSTICS FOR HETEROSKEDASTICITY
 RANDOM COEFFICIENTS

TEST	DF	VALUE	PROB
Breusch-Pagan test	5	1.8784	0.86571

DIAGNOSTICS FOR SPATIAL DEPENDENCE

SPATIAL ERROR DEPENDENCE FOR WEIGHT MATRIX : WIL2.gal

TEST	DF	VALUE	PROB
Likelihood Ratio Test	1	13.8068	0.00020

===== END OF REPORT =====

Hasil Regresi Spasial Wilayah III (*Spatial Lag Model*)

SUMMARY OF OUTPUT: SPATIAL LAG MODEL - MAXIMUM LIKELIHOOD ESTIMATION

Data set : WIL3
 Spatial Weight : WIL3.gal
 Dependent Variable :LOG_GINI Number of Observations: 10
 Mean dependent var :-0.406793 Number of Variables : 7
 S.D. dependent var :0.0430654 Degrees of Freedom : 3
 Lag coeff. (Rho) :-0.15131

R-squared :0.710691 Log likelihood : 23.4062
 Sq. Correlation :- Akaike info criterion: -32.8123
 Sigma-square :0.000536561 Schwarz criterion: -30.6942
 S.E of regression :0.0231638

Variable	Coefficient	Std.Error	z-value	Probability
W_LOG_GINI	-0.1513095	0.05548744	-2.726915	0.00639
CONSTANT	-0.4984567	0.02094004	-23.804	0.00000
PAD	7.756502e-014	3.559755e-014	2.178942	0.02934
PDRB Per K	8.080397e-010	7.208679e-010	1.120926	0.26232
DAU	1.472993e-014	1.439685e-014	1.023136	0.30624
PMDN	-4.061463e-014	2.054725e-014	-1.976645	0.04808
PMA	-2.825016e-015	2.843676e-015	-0.9934383	0.32050

REGRESSION DIAGNOSTICS
 DIAGNOSTICS FOR HETEROSKEDASTICITY
 RANDOM COEFFICIENTS

TEST	DF	VALUE	PROB
Breusch-Pagan test	5	3.2294	0.66467

DIAGNOSTICS FOR SPATIAL DEPENDENCE
 SPATIAL LAG DEPENDENCE FOR WEIGHT MATRIX : WIL3.gal

TEST	DF	VALUE	PROB
Likelihood Ratio Test	1	5.3171	0.02112

===== END OF REPORT =====

Hasil Regresi Spasial Wilayah III (*Spatial Error Model*)

SUMMARY OF OUTPUT: SPATIAL ERROR MODEL - MAXIMUM LIKELIHOOD ESTIMATION

Data set : WIL3
 Spatial Weight : WIL3.gal
 Dependent Variable :LOG_GINI Number of Observations:10
 Mean dependent var :-0.406793 Number of Variables :6
 S.D. dependent var :0.043065 Degrees of Freedom :4
 Lag coeff. (Lambda) :-0.942750

R-squared :0.888570 R-squared (BUSE) : -
 Sq. Correlation :- Log likelihood : 24.236776
 Sigma-square :0.000206661 Akaike info criterion :-36.4736
 S.E of regression :0.0143757 Schwarz criterion : -34.658

Variable	Coefficient	Std.Error	z-value	Probability
CONSTANT	-0.5174856	0.0132276	-39.12166	0.00000
PAD	2.08196e-013	3.828753e-014	5.437697	0.00000
PDRB Per K	4.462763e-009	1.483124e-009	3.009028	0.00262
DAU	-5.166872e-014	2.269971e-014	-2.276185	0.02283
PMDN	-9.972846e-014	1.74317e-014	-5.721099	0.00000
PMA	1.369509e-015	2.104585e-015	0.6507264	0.51522
LAMBDA	-0.9427505	0.04217535	-22.35311	0.00000

REGRESSION DIAGNOSTICS

DIAGNOSTICS FOR HETEROSKEDASTICITY
 RANDOM COEFFICIENTS

TEST	DF	VALUE	PROB
Breusch-Pagan test	5	1.9230	0.85970

DIAGNOSTICS FOR SPATIAL DEPENDENCE

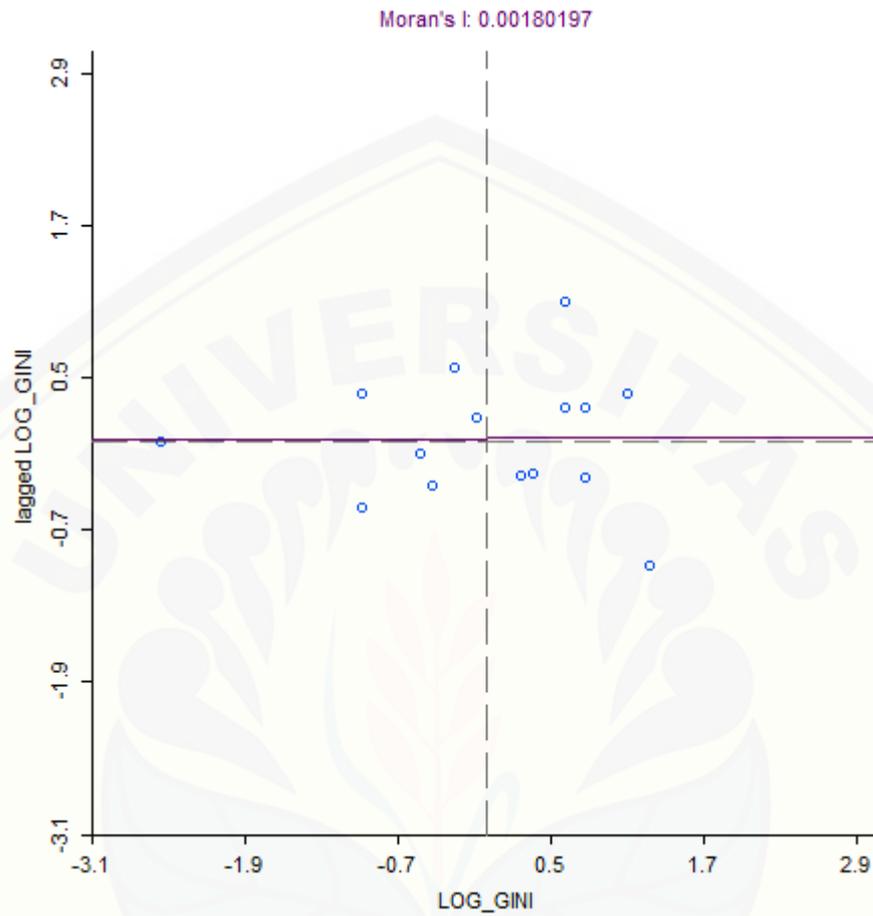
SPATIAL ERROR DEPENDENCE FOR WEIGHT MATRIX : WIL3.gal

TEST	DF	VALUE	PROB
Likelihood Ratio Test	1	6.9783	0.00825

===== END OF REPORT =====

Lampira I. Grafik Indeks Moran

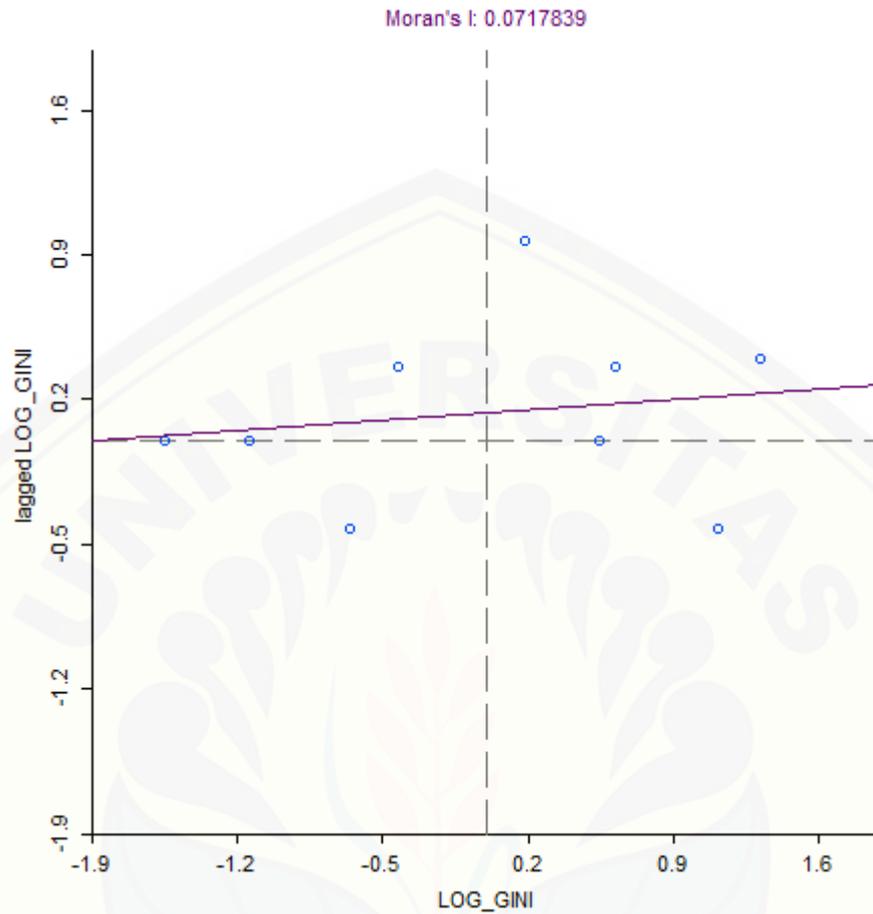
Indeks Moran Wilayah I



$I = 0,00180197$

$E(I) = -0,0714$

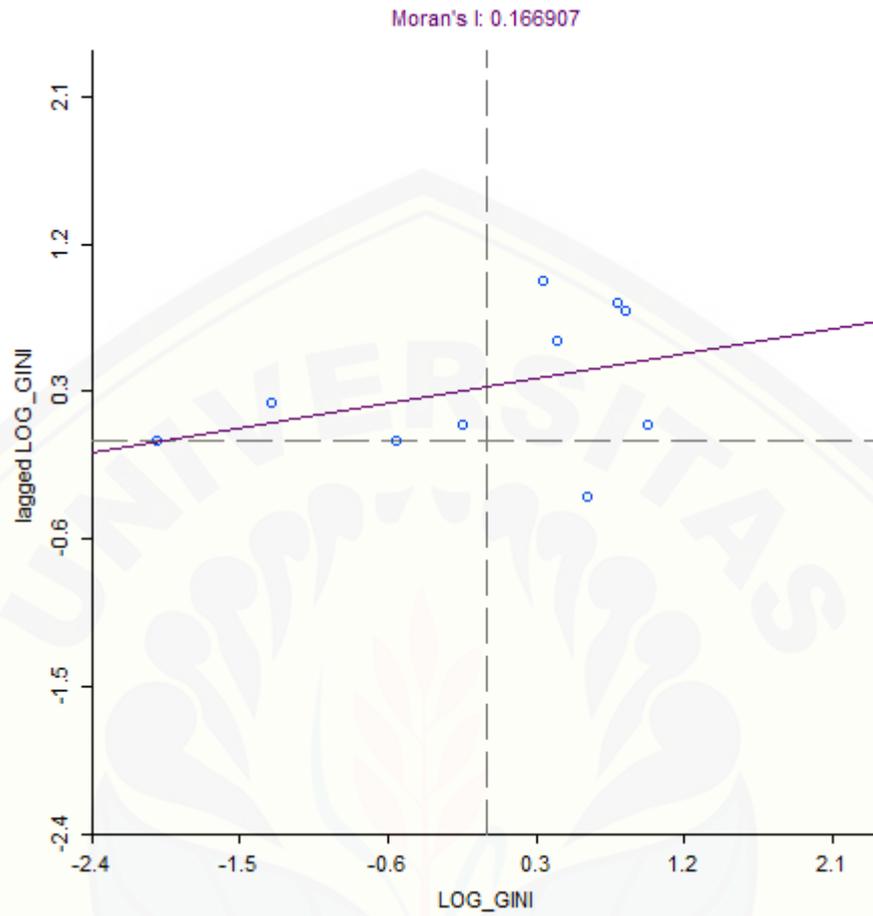
Indeks Moran Wilayah II



$$I = 0,0717839$$

$$E(I) = -0,1250$$

Indeks Moran Wilayah III



$$I = 0,166907$$

$$E(I) = -0,1111$$